



RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
PANJA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI DENGAN
PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI), KONFERENSI
WALI GEREJA INDONESIA (KWI), PERWAKILAN UMAT BUDDHA
INDONESIA (WALUBI), PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI)

- Tahun Sidang : 2024
Masa Persidangan : V (Lima)
Rapat Ke :
Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja
Dengan : 1. Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI)
2. Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)
3. Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI)
4. Parisada Hindu DHarma Indonesia (PHDI)
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024
Waktu : 10.00 WIB s.d 13.04 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Gedung Nusantara 1, Lantai 1
Jln. Jend Gatot Subroto, Jakarta
- Ketua Rapat : DR. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.POL.
Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.IP., M.H.
Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI
- Acara : 1. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan oleh Swasta (sumber dan komponen kebutuhan)
2. Penyampaian Data dan Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan oleh Pemerintah ke Swasta
3. Usulan Regulasi Pembiayaan Pendidikan untuk Swasta
4. Lain-lain.
- Hadir : **PIMPINAN :**
1. Dr. Dede Yusuf ME., S.T.M.I.Pol.
2. Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
- ANGGOTA :**
F-PDI PERJUANGAN :
1. Putra Nababan
2. Dr. Andreas Hugo Pariera
- F-P.GOLKAR :**
1. H. Muhammad Nur Purnamasidi

F-P.GERINDRA:

1. Ali Zamroni, S.Sos.

F-P.NASDEM :

1. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.MTr.

F-PKB :

1. Dr. H. Muhammad Kadafi., S.H., M.H.

F-P.DEMOKRAT :

1. Anita Jacoba Gah, S.E.

F-PKS :

1. -

F-PAN :

1. Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.

F-PPP :

1. -

ANGGOTA YANG IZIN:

1. Rano Karno, S.IP.
2. Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin

UNDANGAN :

1. Persatuan Gereja-gereja Indonesia (Pendeta Henrek Lokra)
2. Persatuan Gereja-gereja Indonesia (Prof. Yafet Y.W. Rissy, S.H., L.L.M., M.Si., Ph.D.)
3. Persatuan Gereja-gereja Indonesia (Johan Tumanduk, S.H., M.M., M.Min., MPd.K.)
4. Persatuan Gereja-gereja Indonesia (Pendeta Lenta E Simbolon)
5. Konferensi Wali gereja Indonesia (KWI) (Bapak Yohanes Vajar Juniyanto, S.Pd., M.M.)
6. Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) (Lili Jayadi, S.Sos.)
7. Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) (DR. Ir. I Wayan Jondra, M.Si.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Hadir, sudah cukup paham keributan belakangan ini terkait masalah kenaikan UKT di PTNBH, jadi bukan di swasta. Dalam berbagai kesempatan saya menyampaikan, mustinya PTN BH ataupun PTN ini belajar kepada PTS, karena PTS mampu menjalankan tugas-tugas pengembangan pendidikan ini tanpa ada dukungan dari pihak pemerintah.

Nah, kita mengundang yang mulia Bapak dan Ibu semua, justru kita ingin belajar, *insight* bapak dan ibu yang hadir di sini kepada kita, sehingga kita punya bahan untuk kemudian kita membuat sebuah mekanisme dengan pemerintah.

Selamat pagi dan,
Salam hormat kami kepada, yang pertama adalah dari persa,

**Dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia,
Yang pertama adalah Bapak Pendeta Lenta Simbolon,**

Oh, Ibu, *oh*, mohon maaf Bu.

**Sekretaris Eksekutif Bidang Keesaan dan Pembaruan Gereja PGI,
Kemudian, Yang Terhormat Pendeta Henrek Lokra,**

Pak, panggilan Pak Henrek, apa Pak Lokra? Oke.

**Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian, PGI,
Yang ketiga Prof. Yafet Y.W. Rissy S.H., L.L.M., S.Si., Ph.D.,
Komisi Pendidikan PGI, Universitas Kristen Satya Wacana,**

Salatiga ya?

Baik.

**Kemudian, Bapak Johan Tumanduk S.H., M.M., M.Min,
Pak Johan, Komisi Pendidikan PGI, Majelis Pendidikan Kristen,
Pendeta Agustinus Setiawidi,
Pak Agustinus Komisi Pendidikan PGI, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi
Jakarta,
Bapak Markus Saragih, Staff Media PGI,**

Lalu, kemudian dari Konferensi Wali gereja Indonesia (KWI), yang hadir adalah.

Yang terhormat Bapak Yohanes Vajar Juniyanto, Komisi Pendidikan KWI,

Kepala Sekolah SMA Strada ya? SMA Strada, baik.

Kemudian dari Perwakilan Umat Buddha Indonesia Walubi yang hadir adalah Ibu Lili Jayadi, Wasekjen Walubi,

Hadir, *oh*, Bapak, baik, baik.

Jadi di sana, eh kebalik ini Bapak ya? Bapak Lili Jayadi S.Sos., Wasekjen Walubi.

Berikutnya, dari Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI), Bapak Dr.Ir. I Wayan Jondra,

Baik.

Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Lalu, Bapak Ketut Budiawan S.H, Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lalu, kemudian KRHT, Astono Candra Dana S.E.,M.B.A., Ketua Bidang Keagamaan dan Spiritualis,

KRHT itu Kanjeng Raden Haryo Tumenggung ya?

Baik. Kemudian.

Dr. Budiana Setiawan, Sekretaris Bidang Kebudayaan dan Kearifan Lokal,

Ah, ini saya takut salah *nih*. Ibu atau Bapak, Ida Jaka Mulyana?

Bapak, benar.

Takut salah saya tadi.

Bapak Ida Jaka Mulyana, Sekretaris Bidang Hukum dan HAM Asasi Manusia,

Kemudian kalau ini sudah pasti perempuan.

Niluh Puspasari, Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan Pemuda dan Perlindungan Anak,

Ada yang belum saya sebut mungkin? Sudah semua. Baik.

Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan rapat kita hari ini adalah mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan oleh swasta, yang kurang lebih adalah mengenai sumber dan

komponen kebutuhan. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu pada dasarnya kami ingin mencari tahu di dalam proses pembiayaan pendidikan *tuh*, satu sumbernya pasti, kedua adalah komponen apa yang kalau di dalam mengurus pembiayaan pendidikan? Baik itu level DIKDASMEN maupun level perguruan tinggi. Sehingga, dari situ kita bisa paham apakah yang menjadi prioritas dan mana yang sub-prioritas.

Kemudian penyampaian data dan pelaksanaan program bantuan pendidikan oleh pemerintah kepada swasta.

Kami juga ingin tahu apa yang sudah dilakukan pemerintah, dan yang ketiga usulan regulasi pembiayaan pendidikan untuk swasta usulan dari Bapak Ibu semua dalam hal ini kepada pemerintah kepada negara.

Jadi, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu semua, terkait bagaimana proses perjalanan atau pembiayaan pendidikan yang ada di Indonesia.

Apakah agenda ini bisa disetujui, teman-teman?

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Setuju ya? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Untuk waktunya, sementara saya, sekarang 10.30, sampai jam makan siang *lah* sampai 12.30 ya atau sampai jam 13.00?

Gimana Pak Putra? Setuju.

F-PDIP (PUTRA NABABAN):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Ya baik, maksimal jam 13.00.

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Baik.

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menurut Undang-undang tentang Sisdiknas tahun 2003, yaitu masyarakat berkewajiban memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Dengan demikian, peran serta masyarakat tidak dapat dipisahkan di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Karena, tanpa adanya peran dan partisipasi masyarakat tidak mungkin pendidikan berhasil dengan maksimal.

Untuk mencapai tujuan tersebut *mandatory spending* pendidikan telah diterjemahkan. Mungkin Bapak-Ibu kemarin sudah mendengar, tidak semua dari 665 triliun itu masuknya ke Kementerian Pendidikan, hampir 85%-nya itu adanya di luar daripada Kementerian Pendidikan.

Oleh karena itu, kita ingin memahami apakah program-program yang selama ini digulirkan oleh pemerintah kepada pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi, antaranya seperti Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, KIP Kuliah, BOPTN dan juga ada BOPTS, mungkin juga sebagian ada yang pernah mendapatkan. Namun, dalam perjalanannya upaya tersebut masih belum menjawab permasalahan aksesibilitas pendidikan di Indonesia dengan kondisi peserta didik lingkungan sekolah dan geografis yang beragam.

Kami kebetulan di Komisi X ini mungkin *day to day*, seringkali menerima aspirasi, baik dari guru, dari sekolah, dari yayasan, dari kampus dan akhirnya kita melihat bahwa perjalanan panjang dunia pendidikan kita ini masih belum optimal. Ditambah kemarin kami dapat informasi juga dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa angka pengangguran sarjana itu masih sangat tinggi sekali dan tidak ada jaminan orang berpendidikan tinggi itu akan mendapatkan pekerjaan. Jadi *nah*, inilah yang kemudian kami mendorong adanya peta jalan pendidikan bagi negara kita ini mau ke mana? Apakah mau divokasi, mau di-*skill*, mau di akademik dan lain-lain. Kita akan mulai melihat ke depan karena lapangan kerja *pun* ke depan juga akan berbeda dengan era digitalisasi industri 4.0 dan sebagainya. *Nah*, kehadiran swasta saya pikir bisa turut memberikan kita pengayaan.

Untuk itu, kami persilakan Bapak dan Ibu sekalian, untuk bisa memberikan masukan-masukan ya, kami gilir saja sesuai dengan apa yang hadir, data saya.

Kita mulai dari PGI, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia.

Kami persilakan pak.

PERSATUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PENDETA HENDRI LOKRA):

Baik, terima kasih pimpinan.

Selamat siang buat kita semua,
Salam sejahtera kami dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia,

Sangat menghargai undangan dari Komisi X dan kami datang Pak Ketua dan Para Anggota Dewan, *full team*, karena kami ya merasa bahwa ini isu yang sangat penting dan sangat strategis, dan karena itu kami menghargai Bapak Ibu yang juga sudah hadir di tengah banyak kesibukan yang lain untuk mendengar pendapat dari majelis agama, dan juga saya beri hormat pada majelis agama yang lain yang juga sudah hadir.

Nah, kesempatan ini kami akan, kami sudah menulis pandangan dan pikiran, bahkan rekomendasi dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, tapi ada beberapa hal yang nanti akan diberikan pada kesempatan ini oleh. Saya berikan kesempatan kepada Profesor Yafet untuk memulai menyampaikan pendapat dari PGI.

Silakan Prof.

PERSATUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI) (Prof. YAFET Y.W. RISSY, S.H., L.L.M., M.Si., Ph.D.):

Baik, terima kasih Pak Hendri.

**Yang terhormat Pak ketua Panja, Bapak Dede,
Dan juga yang terhormat fraksi yang sempat hadir, perwakilan fraksi,
Bapak Ibu Majelis Anggota Komisi X yang lain,
Dan Majelis Agama yang hadir pagi ini,**

Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Panja demikian juga dari Pak Hendri, belakangan ini memang kita semua tersentak dengan berbagai persoalan yang terkait dengan pendidikan tinggi di Indonesia pada umumnya, khususnya perguruan tinggi negeri dan sebetulnya juga perguruan tinggi swasta, hanya memang mungkin belum mencuat saja secara *viral* di publik.

Sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan, saya dalam konteks ini menyampaikan apa yang sudah dirumuskan oleh PGI, namun sehari-hari saya bekerja sebagai seorang guru besar dalam bidang hukum dan ekonomi tetapi juga sebagai mengurus Perguruan Tinggi Kristen, Universitas Kristen Satya Wacana, sehingga mengetahui dengan dekat apa yang sedang menjadi pergumulan di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia mengalokasikan APBN sebesar 20% dari total APBN kita, sesuai amanat Undang Undang Dasar, maupun Undang-undang 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, hingga saat ini kita ketahui bersama bahwa alokasi 20% dari APBN tersebut menyisakan banyak pertanyaan secara khusus, baik kepentingan pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta, dari dasar sampai ke perguruan tinggi. Data lengkap sudah.

Saya kira bapak ibu sudah punya tidak perlu saya ulang, dalam konteks Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang saat ini memiliki 97 sinode anggota, di mana sinode-sinode tersebut tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki Yayasan Pendidikan Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi.

Keanggotaan gereja yang tergabung dalam PGI mewakili 80% dari umat protestan di Indonesia. PGI juga terpenggil untuk menyuarakan keadilan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Dengan, untuk maksud itulah, kami sangat menghargai undangan dari Komisi X pada rapat pagi ini.

Apa situasi problematik kita terkait dengan pembiayaan dan pengelolaan pendidikan oleh pihak swasta pada umumnya, baik dari dasar maupun sampai ke perguruan tinggi?

Bapak Ibu yang terhormat,

Penyelenggaraan pendidikan baik oleh negeri maupun swasta memiliki tujuan yang sama, sesuai dengan amanat konstitusi kita, pembukaan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, hak yang diterima dalam bentuk bantuan dari pemerintah berbeda dan terkesan tidak merata atau adil, di mana penyelenggara pendidikan swasta sekalipun telah mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi masih sangat minim. Satu isu penting yang tadi disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua Panja Pak Dede yang memantik perhatian kita saat ini adalah masalah UKT dan seterusnya.

Bapak Ibu sekalian,

Persoalan UKT hanya merupakan *resultante* dari apa yang terjadi dalam proses *political situation promatic* yang terjadi dalam 15 tahun terakhir, yang kita maksudkan, dan kami PGI membahas ini secara mendalam adalah kecenderungan neoliberalisasi pendidikan tinggi yang sangat masif melalui pendidikan tinggi PTBH maupun BLU, dan kecuali satker karena itu di bawah kementerian. Yang terjadi adalah sepertinya adalah privatisasi perguruan tinggi negeri ya, baik dalam modal BH maupun BLU, sadar atau tidak ketika dikelola seperti BUMN sesuai dengan Permenristekdikti dan Peraturan Menteri Keuangan, maka orientasi profit menjadi sangat-sangat kental. Apa yang menjadi, itu adalah dasar masalah kita pagi hingga saat ini.

Akibat lanjutannya, PTN, ibarat seperti sebuah perusahaan yang mengelola perusahaan dengan melakukan produksi massal dan mengabaikan kualitasnya. Yang lebih parah lagi akibat daripada orientasi profit dan tidak

boleh defisit, karena itu diwajibkan oleh Permenistekdikti dan oleh Peraturan Menteri Keuangan, Perguruan tinggi negeri berlomba-lomba menerima mahasiswa, bergelombang-gelombang tanpa batas, bahkan sampai bulan September dan Oktober pun masih menerima dengan jalur mandiri. *Nah*, ini anomali yang luar biasa.

Sederhana nampaknya, tetapi implikasinya luar biasa tidak hanya bagi PTN, tetapi implikasinya bagi perguruan tinggi swasta pada umumnya. Akibat dari penerimaan tanpa batas tersebut, nampaknya aspek kualitas tidak lagi menjadi perhatian, tapi kita lebih memberi perhatian kepada aspek *quantity*.

Di sisi lain, ini memberi dampak yang luar biasa bagi mahasiswa dan orang tua, sebagaimana kita ketahui beberapa waktu terakhir UKT, salah satu contoh saja, di salah satu perguruan tinggi negeri di Solo di bidang kebidanan itu UKT-nya 125 juta per tahun, naik hampir, dari 25 juta sebelumnya, itu data yang saya baca. Artinya, kalau saya bandingkan dengan Australia mereka membayar per semester kurang lebih 80 juta kurang lebih, kita membayar rata-rata kalau 200 UKT-nya, dipanggil rata-rata aja per semester 100. Tapi, kalau kita bandingkan itu besaran dengan *income* per kapita kita, ini jomplang.

Australia tahun 2023 *income* perkapitanya 65.400, Indonesia angka per kapita kita tahun 2023 kemarin 4.580 kurang atau lebih. Tapi kita disuruh membayar yang sama. Ini yang saya katakan neoliberalisasi pendidikan yang sangat masif dan tidak terkontrol oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini mendapat perhatian dari yang mulia, yang terhormat Bapak-Bapak di Komisi X.

Di sisi lain keberadaan Universitas Terbuka menerima mahasiswa tanpa batas. Siapa yang mengontrol? Hampir kurang lebih 500.000 per tahun. Masuknya gampang Pak Ibu, keluarnya entah ke mana. Belum lagi kita bicara mengenai *quality control*-nya.

Tadi saya senang mendengar dari Bapak Ketua Panja Pak Dede Yang terhormat, ini orang mau cari kerja ke depan, ini sertifikasi, *certificate* dan jasa dan macam-macam atau *skill*, *nah* apakah kita masih butuh persoalan ini?

Bapak Ibu yang terhormat,

Bagi perguruan tinggi swasta, situasi pengelolaan PTN dan Universitas Terbuka ternyata memberikan dampak negatif, berupa penerimaan mahasiswa baru yang terus menurun secara drastis. Jika situasi ini terus berlanjut, dikhawatirkan banyak PTS akan bangkrut dan sekarang itu yang terjadi beberapa sudah *merger* bahkan ada yang tutup.

Padahal sebagaimana kita ketahui sejauh ini, perguruan tinggi swasta berperan aktif dalam meningkatkan angka partisipasi kasar aktif kita di perguruan tinggi. Saya ambil contoh, Tahun 2022 APKPT itu 39,37% dari jumlah 37, 39,37% tersebut, PTN menyumbang 25%, PTS menyumbang 75% nya. Jadi, persoalan besar bagi republik ini, saat ini adalah kita ingin

meningkatkan APK. Oke kita setuju, tapi siapa, kalau negeri totalnya itu 150 PTN sekolah tinggi termasuk kedinasan, swasta 4500 an lebih, dan 75% untuk APK dipegang oleh swasta.

Kami berpendapat berdasarkan data ini, idealnya PTN itu lebih fokus kepada bukan APK-nya, fokus kepada kualitasnya, dan riset-riset yang berorientasi pada penelitian-penelitian dasar atau fundamental, baik untuk menghasilkan paten, bila perlu untuk nobel. PTN seharusnya ke sana, bukan untuk mengejar angka partisipasi aktif kita, APK kita. Jadi, saat ini PTN, PTS, sekolah-sekolah SD, SMP, SMUK, Swasta, Negeri, memiliki kemampuan kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam hal pembiayaan dari sisi *stakeholder* di Persekutuan Gereja Indonesia, komponen biaya pendidikan mencakup, antara gaji, restitusi kesehatan, administrasi umum, representasi, kerumahtanggaan, bahan kuliah SKS, uang sumbangan pembangunan, kemahasiswaan, pemeliharaan, perbaikan asuransi dan non akademik lainnya seperti personalia, iklan promosi asrama dan seterusnya.

Di luar biaya-biaya di atas, sekolah-sekolah swasta dan PTS juga harus menanggung juga biaya lain yang tidak ditemukan di perguruan tinggi negeri atau sekolah-sekolah negeri seperti PBB, perpanjangan HGB, AMDAL dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan semakin mahalnya biaya operasional pendidikan. *Nah* saya, idealnya jika dimungkinkan, kami sangat berharap Komisi X bisa memfasilitasi agar isu-isu ini bisa diselesaikan.

Sekarang penyampaian data mengenai program bantuan yang selama ini diterima oleh pendidikan tinggi swasta, maupun swasta dari. Sejauh ini Universitas-universitas Kristen, tentu di bawah koordinasi dan konsultasi dengan PGI, seperti Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Universitas Kristen Arta Wacana di Kupang, Universitas Kristen Indonesia di Jakarta, dan beberapa PTS lainnya, sudah menerima bantuan dan kami mengucapkan terima kasih, antara lain mulai dana sertifikasi dosen, penempatan dosen Non PNS, Beasiswa KIP maupun KPI, hibah program sesuai dengan kategorisasi berbasis kompetensi, hibah penelitian sesuai dengan klaster berbasis kompetensi, dan program pertukaran mahasiswa ISMA yang sekarang sedang digenjutkan oleh Kemenristekdikti. Tetapi khusus untuk sekolah-sekolah berbasis teologi, harus diakui bahwa tidak menerima bantuan, bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkannya. Kami mohon perhatian juga untuk isu ini.

Usulan rekomendasi; perlu ditinjau kembali kebijakan privatisasi, *sorry* kalau menggunakan istilah ini, karena praktiknya seperti itu. Privatisasi PTN melalui status PTBH ataupun PTBL. Tadi saya sudah gambarkan, jomplangnya luar biasa, kita itu lebih liberal dari Amerika, lebih liberal dari Australia dan Inggris dan Uni Eropa. Dalam konteks pembiayaan, ini luar biasa, sementara *income* per kapita tadi saya sudah menyinggung. Apalagi kita ambil reratanya dan kita bicara soal distribusi of *income*, itu akan jauh lebih jomplang lagi apalagi kita bicara soal Indeks Gini jauh lebih parah lagi ya.

Perlu penetapan penerimaan pembatasan penerimaan mahasiswa baru oleh PTN yang bergelombang-gelombang misalnya melalui Ujian Nasional saja oleh negara atau oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dan kami sangat mengusulkan perlu juga di penerimaan jalur mandiri, itu cenderung eksploitatif dan komersial tanpa batas. *Nah*, ini perlu juga dan ini berpotensi adanya suap dan korupsi. Kita ingat kasus Udayana, kasus Lampung rektornya ditangkap itu karena jalur mandiri, ya.

Kami juga berharap dari PGI ada transparansi pengelolaan 20% itu ke mana saja. Kita sebagai warga negara, juga sebagai *grey area* perlu tahu, *nah* karena kita juga membayar pajak untuk itu.

Usulan yang lain terkait dengan alokasi 20% sebaiknya dikelola Kemenristekdikti saja. Kita tahu bersama, saya kira data sudah ada di Bapak Ibu sekalian itu yang masuk ke Kemenristekdikti itu hanya 97 atau 99 triliun dari 600 sekian triliun, jadi yang lain itu ke mana? Apakah itu memang amanat konstitusi atau amanat undang-undang Sisdiknas sesuai dengan 20% itu harus disebar seperti itu, atau harus ke Kemenristekdikti saja? Bapak Ibu yang tahu. Tetapi yang jelas adalah lebih baik kalau itu difokuskan dikelola oleh Kemenristekdikti saja.

Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,

Usulan konkret yang lain terkait dengan, sudah tertulis, tetapi saya ingin langsung saja ke skema pembiayaan berbasis kinerja, ini usulan yang lain. Mengalokasikan sebagian dana pembiayaan berdasarkan capaian indikator kinerja perguruan tinggi swasta, misalnya kualitas lulusannya, publik ilmiah dan inovasi, tingkat keterserapan lulusan di lembaga pengguna lulusan ini menyangkut *employability* ya, memberi bantuan finansial terukur yang dapat dimanfaatkan oleh swasta, pendidikan swasta untuk meningkatkan kualitasnya. Atau contoh yang model yang lain adalah memberikan bantuan operasional langsung melalui LL Dikti, kepada perguruan tinggi Kristen atau sekolah-sekolah swasta lainnya, berdasarkan klusternya, status akreditasinya berdasarkan jumlah prodi, atau berdasarkan jumlah mahasiswa.

Saya kira ada juga usulan agar ada insentif pemetaan akses ya, dukungan riset dan pengembangan, dan peningkatan kualifikasi dosen. Ini sudah diterima, tapi rasa rasanya perlu ditingkatkan.

Untuk selanjutnya usulan rekomendasi kebijakan dan regulasi pembiayaan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk swasta saya serahkan kepada Pak, Pak Johan.

PERSATUAN GEREJA-GEREJA INDONESIA (PGI) (JOHAN TUMANDUK, S.H., M.M., M.Min., MPd.K.):

Terima kasih yang mulia.

Izin Pak ketua bicara.

f

Pertama-tama saya perlu memperkenalkan diri sedikit, bahwa kami dari Majelis Pendidikan Kristen itu mengoordinasi kurang lebih 5.700 sekolah-sekolah Kristen, 5.700 sekolah-sekolah Kristen mulai dari PAUD, kemudian pendidikan dasar dan menengah.

Ada beberapa hal yang mau kami sampaikan dalam kesempatan yang luar biasa ini.

Yang pertama adalah, soal ketidaksetaraan bantuan, memang ini merupakan hal yang seringkali sudah dibicarakan, tapi perlu Pak Ketua juga ketahui dan Bapak-bapak wakil rakyat yang saya hormati, bahwa 40% dari sekolah-sekolah kristen swasta ini, mengalami kondisi *declining* pak. Jadi ini jelang tutup sebetulnya, kalau kita mau bilang, bahwa hanya sekitar 30% itu yang posisinya stagnan. Artinya tidak maju tidak mundur juga, dan hanya 10% yang ada di posisi maju, saya sebutkan saja misalnya Penabur, Pelita Harapan dan yang lain-lain. Tapi 40% ini justru ada di daerah-daerah terpencil 3T dan persoalan besarnya adalah bantuan dari pemerintah, biaya pendidikan ini, investasi kah, operasional kah, maupun personal. Itu betul-betul tidak memadai *gitu* dan menurut saya kita bukan sedang beromantisme masa lalu, tapi sekolah Kristen itu ada sebelum negara ini berdiri dan oleh karena itu, sekolah Kristen pada saat di masa lampau merupakan sekolah-sekolah yang cukup maju, bahkan guru-guru Kristen itu menjadi guru bagi sekolah-sekolah di Jawa, itu kenyataan yang ada. Tapi, kenyataan yang riil saat ini adalah sekolah-sekolah Kristen ini justru tertinggal sekali gitu dan oleh karena itu ada tiga hal yang mungkin menjadi catatan kami.

Yang pertama adalah standar penentuan biaya. Selama ini kan jumlah murid berapa, kemudian apa hal-hal yang seperti itu saja tanpa melihat kondisi objektif sekolah-sekolah kita di lapangan. Oleh karena itu, kami memohon kepada Bapak sebagai ketua Pak Dede Yusuf, bagaimana kita bisa memiliki *political will* yang lebih besar gitu? Untuk bisa memperjuangkan kemajuan daripada sekolah-sekolah tertinggal ini, itu yang pertama.

Yang kedua adalah bagaimana pemerintah melihat sekolah swasta secara khusus sekolah Kristen ini sebagai *partner* atau sebagai musuh? Karena kalau jadi musuh ya kita akan mati semua, tapi kalau *partner* saya pikir pemerintah juga harus harus mau memberikan perhatian lebih.

Saya orang Jakarta yang tinggal di Jakarta, dari lahir di Jakarta, saya melihat bahwa sekolah-sekolah negeri ini maju begitu rupa sudah sedemikian maju. Sementara ketika saya pergi ke daerah-daerah terpencil kondisinya tidak berubah sejak puluhan tahun lalu. *Nah*, ujungnya adalah kualitas manusianya kan tidak berkembang, guru-gurunya juga sekolah ke, guru-guru di timur di NTT misalnya, mereka pergi ke Malaysia Pak sekarang.

Ya lalu yang terakhir mungkin ini juga penting soal PPG, PPG Pra Jabatan maupun dalam jabatan, yang terjadi adalah setelah para guru dan calon guru pra jabatan ini mengikuti PPG yang terjadi mereka lari masuk program P3K dan ketika masuk program P3K, jadi ASN. Sekolah-sekolah kami

masih sangat ditinggal jadinya jadi tertinggal lagi makin tertinggal. *Nah* usulan konkret kami adalah mungkinkah Pak, para lulusan P3K PPG Pra Jabatan dan dalam jabatan ini kembali ke sekolah masing-masing. Saya *nggak* tahu sebagai ASN apakah ini dimungkinkan, tapi kami sangat berharap supaya semakin tidak terjadi kekosongan di sekolah-sekolah swasta.

Dan yang terakhir perlu kami sampaikan berdasarkan realita yang ada pak ketua bahwa, anak-anak Papua itu memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa Pak. Jadi mereka ikut olimpiade dan mereka mendapatkan banyak prestasi di sana dan ini merupakan kesempatan besar sebetulnya buat kita untuk memajukan kualitas pendidikan melalui biaya pendidikan yang saat ini betul-betul sedang menjadi perhatian teman-teman, Bapak Ibu terhormat di DPR RI dari kami seperti itu.

Terima kasih Pak Dede, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak? Baik.

Terima kasih dari PGI Bapak-Bapak dan kawan-kawan pendeta dari PGI.

Ini catatan penting *nih*, kebetulan Pak Putra juga sangat *concern* dengan pendidikan Katolik ini. Katolik atau Protestan ya?

Protestan ya? Mungkin PIP-nya Pak Putra juga banyak disalurkan ke sekolah-sekolah itu kali? Beragam, baik terima kasih.

Selanjutnya kami mohon dari Konferensi Wali Gereja Indonesia, silakan Pak Yohanes.

KONFERENSI WALI GEREJA INDONESIA (YOHANES VAJAR JUNIYANTO, S.Pd., M.M.):

Baik, selamat pagi.

Yang terhormat Bapak Ibu Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat,

Berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan, ada tiga hal ini, namun kami menyoroti dari lima, nomor lima dari, terkait dengan pemangku kepentingan dari pertanyaan berdasarkan TOR yang diberikan oleh kami.

Yang pertama terkait dengan tanggapan kami, pertama-tama salam dulu dari Bapak Uskup yang kebetulan beliau tidak bisa hadir dan.

KETUA RAPAT:

Izin saya potong, tadi kan Protestan ini berarti.

KONFERENSI WALI GEREJA INDONESIA (KWI) (YOHANES VAJAR JUNIYANTO, S.Pd., M.M.):

Katolik kami.

KETUA RAPAT:

Katolik ya, baik.

Terima kasih.

KONFERENSI WALI GEREJA INDONESIA (KWI) (YOHANES VAJAR JUNIYANTO, S.Pd., M.M.):

Baik kami dari Konferensi Wali Gereja Indonesia mewakili Komisi Pendidikan dari KWI, ingin memberikan sedikit tanggapan berkaitan dengan harapan dari pemerintah terkait dengan dana ya, dana bantuan pendidikan maupun pengelolaannya.

Kami mengambil dari nomor 5 saja, dari pemangku kepentingan masyarakat ini. Bagaimana tanggapan dan masukan terhadap program bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah dan juga dari pemerintah daerah. Kami secara umum ya, bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah ini sangat membantu kami, terlebih untuk sekolah-sekolah Katolik yang ada di pedalaman ya, yang di Papua di Keuskupan Papua, maupun yang ada di bagian timur dan itu sangat membantu mereka sekali seperti itu.

Kemudian berkaitan dengan besaran anggota anggaran BOS atau anggaran bantuan pemerintah di satuan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah pedalaman, masukan dari teman-teman di 37 Keuskupan, mereka berharap semoga bisa dipertimbangkan untuk dinaikkan. Ya karena untuk terkait dengan transportasi, lalu pembiayaan-pembiayaan yang lain untuk pembelian barang saja sangat mahal, terlebih di pedalaman ya, baik di Papua maupun di pedalaman yang lain untuk ke kota saja, itu transportasinya luar biasa.

Kemudian terkait dengan Program Indonesia Pintar atau KIP yang langsung diberikan kepada siswa. Ini harapannya sebaiknya anggaran itu bisa langsung masuk ke rekening sekolah untuk membantu biaya SPP siswa. Karena di beberapa tempat PP ini tidak langsung dibayarkan oleh orang tua ya, biasa begitu. Sehingga sekolah meminta, malah, dalam tanda kutip, kita malah adu argumentasi, seperti itu. Jadi, mereka menggunakannya untuk kebutuhan keluarga terlebih dahulu, ya syukur kalau ada dibayar, kalau tidak. Ya akhirnya kita tidak dibayar, seperti itu dan itu yang akan menjadi menghambat dalam program kegiatan sekolah.

Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana implementasi pengelolaan bantuan pendidikan di satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dan apa saja kendala yang dihadapi dalam perencanaan penggunaan dan pelaporan penyelenggaraan pembiayaan urusan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Terkait dengan implementasi pengelolaan bantuan pendidikan, kami sudah melaksanakannya sesuai dengan juknis ya, petunjuk teknis dari dinas pendidikan dan kami apresiasi karena secara umum pengolaannya sangat baik ya, untuk pengembangan sekolah dimulai dengan perencanaan dengan membuat RKAS dulu dari kebutuhan sekolah. Kemudian RKAS yang dibuat itu penggunaannya pun sesuai dengan anggaran yang dibuat. Baik juga nanti ada perubahan-perubahan anggaran itu pun akan disesuaikan, dan juga dalam pelaporan juga sangat baik. Karena satu pintu ya, lewat aplikasi yang sudah dibuat oleh Kementerian yang tiap tahun semakin diperbaiki atau ditingkatkan sehingga memudahkan operator dalam membuat laporan keuangan.

Namun ada beberapa kendala terkait dengan operator sekolah, kalau di kota besar itu tidak terlalu berkendala dalam membuat pelaporan karena kemampuan operator kalau di kota dalam bidang IT agak lumayan. Namun kendala di operator di pedalaman ini masih terkendala kemampuan IT yang masih lemah, itu yang perlu juga latihan, yang perlu dipahami oleh kita semua. Selain itu lemahnya jaringan internet di daerah pedalaman, bahkan harus naik gunung atau bukit ya, bahkan harus di tengah lapangan atau di atas pohon untuk mendapatkan sinyal atau jaringan internet. Ini juga menjadi kendala terkait dengan pembuatan pelaporan.

Yang berikutnya terkait dengan adanya aplikasi SIPLah ya, kalau dalam pembelanjaan, tentu kita menggunakan aplikasi yang namanya SIPLah. SIPLah ini sebagai tempat jual beli barang secara online yang sudah diatur oleh kementerian, yang merupakan kebijakan yang baik ya supaya satu pintu, tetapi kebijakan harga di aplikasi SIPLah ini yang agak sedikit berbeda. Karena agak sedikit lebih tinggi kalau di SIPLah dengan harga barang di pasar yang ada padahal sudah berpajak tapi di SIPLah juga agak tinggi dan ini menjadi perhatian kita perhatian pemerintah, apakah ini perlu dikaji ulang terkait dengan harga di SIPLah seperti itu.

Kemudian masukan juga dari teman-teman pendidik di pedalaman, terkait dengan tadi kendala listrik, jaringan internet, berkaitan dengan implementasi pengelolaannya. Yang pertama, sama seperti dari PGI tadi di pedalaman itu SDM kita kurang banyak, baik pendidik dan juga operator sekolah. Kadang siswanya sedikit, maka Bantuan Operasional Sekolahnya itu juga sedikit, sehingga biaya operasional dan pengembangan sekolah itu yang menjadi terkendala seperti itu.

Kemudian yang kedua dalam pembelanjaan ya, ada perbedaan harga di kota dan di pedalaman itu yang sungguh jauh berbeda. Contohnya untuk membeli alat tulis saja di kota itu tentu agak lebih murah, bolpen misalnya harga Rp5.000 ya, 10 tapi kalau di pedalaman itu bisa bisa menjadi Rp12.000 bahkan

bisa menjadi Rp25.000, hanya bolpen kecil seperti itu ya. Kemudian belanja barang-barang lain itu juga menjadi besar. Maka harapannya tadi harga barang yang mahal itu juga bisa diakomodir terkait dengan dana BOS yang mungkin bisa dinaikkan seperti itu.

Yang ketiga terkait dengan pelaporan, karena di pedalaman itu tadi disampaikan listrik dan jaringan internet agak susah, maka pelaporan tidak bisa tiap bulan. Kalau di kota kita memang tiap bulan akan laporkan pak, jadi kita laporkan tiap bulan. Jadi dari pedalaman itu menyampaikan mohon disampaikan berkaitan dengan ini kebijaksanaan untuk pelaporan untuk di pedalaman, mungkin bisa 3 bulan atau 6 bulan sekali, sehingga pelaporannya yang baik bisa diselesaikan seperti itu.

Yang ketiga pertanyaannya, bagaimana pola koordinasi dengan Kemendikbudristek, Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan terkait penyaluran penyerapan dan pelaporan penggunaan. Dari kami selama ini pola koordinasi dan komunikasinya sangat baik ya, jujur kami katakan pemerintah luar biasa mereka membuat jaringan yang luar biasa yang sangat baik. Jadi informasi-informasi dari dinas pendidikan itu sering mengingatkan kami berkaitan dengan adanya dana BOS yang akan cair atau ada laporan-laporan yang harus disiapkan atau ada perubahan-perubahan apapun. Biasanya itu akan disampaikan melalui pengawas kami, biasanya seperti itu, baik dari kota maupun sampai di provinsi kantor cabang dinas.

Yang keempat, apakah kebijakan pembiayaan pendidikan yang sudah berjalan saat ini sudah mengakomodir kebutuhan pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan yang dikelola oleh organisasi masyarakat? Jawaban kami kebijakan pembiayaan pendidikan, tadi sudah kami sampaikan sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan juknis yang ada dan juga sudah mengakomodir kebutuhan pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan. *Nah* harapannya, sekolah-sekolah jauh dari kota atau di pedalaman, ini juga menjadi perhatian lebih oleh pemerintah berkaitan dengan tadi bantuan pendidikan dan juga bantuan tenaga pendidik yang kurang.

Program P3K itu juga sangat baik ya. Ada program P3K ada program Daljab. Namun, Program P3K ini kadang kami mengharapkan mereka ya, yang sudah baik ini untuk meningkatkan kesejahteraan guru, baik di daerah pedalaman, harapannya tadi tidak perlu dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi P3K yang sudah lulus, P3K harapannya tetap di sekolah swasta kami, sehingga tidak usah dipindahkan ke sekolah negeri. Karena kami sudah latih baik-baik ya, bina baik-baik kemudian lulus P3K pindah ke negeri, habislah kami, gitu ya. Guru-guru kami habis, sehingga kami mencari lagi dan melatih kembali dan itu kan butuh energi atau *support* yang cukup banyak, seperti itu.

Kemudian yang kelima, substansi apa saja yang perlu didekonstruksi dalam kebijakan penganggaran fungsi pendidikan? Saat ini kebijakan penganggaran fungsi pendidikan, kami menilai cukup baik ya, sudah cukup baik. Sampai saat ini adanya dana bantuan pemerintah ini, sering sekali disalahartikan oleh orang tua, bahwa dengan adanya bantuan ini pemerintah

dianggap sudah membayar SPP siswa, seperti itu, yang bersekolah di sekolah swasta ya. Ini kacanya padahal dana BOS yang kita tahu ya, satu siswa kurang lebih bervariasi ya ada yang dengan 1.500.000 1.300.000 seperti itu kalau dibagi 12 itu sekitar 96 atau 100.000-an seperti itu, dan itu untuk kegiatan kita sangat minim, sehingga dana BOS untuk membantu sedikit kebutuhan anggaran atau kegiatan sekolah yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan yang direncanakan satuan pendidikan, sehingga satuan pendidikan swasta yang dikelola masyarakat tetap membutuhkan komitmen orang tua untuk membayar SPP.

Sekolah atau satuan pendidikan yang dikelola masyarakat butuh sekali dukungan moral ya, bila ada orang tua, ada orang tua yang cukup berada, namun ada yang tidak membayar uang sekolahnya sejak awal ya. Namun sering sekali memaksakan haknya ya, hak dan kewajiban hanya diminta, diminta sampai lulus, sedangkan satuan pendidikan ini sudah memberikan kebijakan untuk peserta didik untuk tetap bersekolah ya.

Beberapa juga dari siswa-siswi juga kami carikan beasiswa ya, baik dari CSR ataupun dari mana saja yang mau membantu kami ya. Walaupun tidak banyak, namun itu sedikit banyak bisa meringankan sisa-sisa SPP yang ada. Namun kadang-kadang orang tua *tuh* beralasan banyak sekali, terlebih tadi karena sudah ada dana BOS maka *nggak* usah bayar, *nah* ini yang menjadi kekacauan juga. Sehingga, satuan pendidikan kesulitan untuk membayar pendidik dan tenaga pendidikan yang melebihi satuan pendidikan yang ada di pedalaman seperti itu.

Kurang lebih ini pandangan kami Bapak ketua terkait dengan lima pertanyaan yang disampaikan di TOR.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dari KWI *cuman, cuman* satu aja Pak yang menyampaikan?

KONFERENSI WALI GEREJA INDONESIA (KWI) (YOHANES VAJAR JUNIYANTO, S.Pd., M.M.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Oke, berikutnya kami mohon dari Walubi, Ibu, *eh*, Pak Lili.

Silakan Pak.

PERWAKILAN UMAT BUDDHA INDONESIA (WALUBI) (LILI DJAYADI, S.Sos.):

Baik, terima kasih.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi X DPR,
Yang terhormat Perwakilan dari fraksi yang hadir,
Yang terhormat juga kepada perwakilan dari lembaga agama yang hadir,
Yang terhormat Bapak Ibu sekalian,**

Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kami dari Walubi, baik dari pengurus pusat, pengurus inti, semuanya sedang sibuk untuk merayakan hari waisak besok pak, jadi kami tidak mempersiapkan secara baik untuk rapat hari ini. Namun dari ketua umum ada sedikit menyampaikan Pak, perihal rapat hari ini, seperti di dalam latar belakang panduan rapat pada hari ini disampaikan bahwa pendidikan itu seharusnya menjadi hak setiap warga untuk mendapatkannya. Kemudian adalah kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik gitu ya.

Kemudian dari anggaran yang begitu besar yang sudah diapa, gelontorkan oleh pemerintah. Seharusnya pendidikan itu kalau memungkinkan menjadi gratis gitu loh, tapi saya belum saya juga tidak mengerti apa yang terjadi sebetulnya. Karena pendidikan itu *kan* sebetulnya bukan barang atau jasa yang kita jual atau kita beli. Seharusnya seperti itu, kalau menurut pandangan saya, seharusnya pendidikan itu semakin lama semakin murah pak, bukan semakin mahal.

Kemudian dari apa yang terjadi belakangan ini yang menjadi viral tentang biaya pendidikan yang kemudian meningkat dan muncul gejala di mana-mana. Jadi pesan dari ketua umum sebetulnya, anggaran yang begitu besar ini seharusnya digunakan maksimal untuk pendidikan agar biaya pendidikan itu menjadi murah gitu.

Kemudian usulan dari kami sebetulnya adalah, yang pertama adalah transparan transparansi penggunaan dananya Pak, seperti apa. Kemudian kalau untuk kami di lembaga pendidikan agama Buddha, di kami itu hampir seluruhnya dibiayai oleh sendiri Pak. Jadi kita *nggak, nggak, nggak* bergantung atau kita *nggak* mendapatkan dana dari pemerintah. Semuanya kita lakukan sendiri gitu. Yang bagi mereka yang tidak mampu kita akan tunjang oleh lembaga pendidikan itu, itu yang terjadi sebetulnya dan memang di agama Buddha ini belum ada pendidikan umum, semuanya baru di Pendidikan Agama Buddha saja untuk, untuk di pendidikan tingginya.

Saya rasa itu aja pak yang bisa saya sampaikan, dan pesan dari Bu Ketua Umum seperti demikian Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Lili sekaligus juga kami menyampaikan selamat nanti hari Waisak yang besok akan dilaksanakan.

Terima kasih.

Berikutnya kami persilakan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) untuk menyampaikan paparannya.

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (KETUT BUDIAWAN, S.H., S.Pd.H., M.H., M.Fil.H.):

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Izin kami mengawali Ketut Budiawan, Pimpinan Sidang. Kami dari PHDI, mohon maaf Ketua Umum Bapak Wisnu lagi ada di Bali, jadi kami dari bidang dan sekretaris yang akan menyampaikan.

Bapak Ibu dan Pimpinan Sidang,

Sesuai dengan TOR yang kami peroleh, kami menyampaikan beberapa pokok permasalahan tentang ketersediaan, keterjangkauan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang kemudian diturunkan sesuai dengan pokok permasalahan yang lima. Kemudian juga disambung dengan pokok pertanyaan dan tanggapan pemangku kepentingan atau masyarakat, itulah yang akan kami sampaikan.

Kami dari Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM dan Ketua Bidang, Bapak Wayan di Bidang Pendidikan. Mungkin kami mulai dari yang pertama pimpinan sidang tentang turunan dari pokok permasalahan ketersediaan, keterjangkauan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Kita awali dari klusterisasi dan item-item pembiayaan, kami memiliki tanggapan dari hasil diskusi kami dengan pengurus, bahwa yang pertama memang perlu dilakukan kajian ulang terkait kesesuaian klusterisasi dan item-item pembiayaan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah di daerah, karena apa? Karena memang pemerintah daerah hampir lepas terutama kepada pendidikan-pendidikan swasta, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, klusterisasi pendidikan di perguruan tinggi swasta sampai saat ini memang berada di bawah klusterisasi binaan, apalagi umat Hindu Pak Pimpinan Sidang, kemudian sehingga perguruan tinggi swasta perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan pembiayaan pendidikan. Jadi antara ada dan tidak ada untuk di pendidikan kami Pak Pimpinan Sidang.

Kemudian yang kedua, terkait dengan skema atau formulasi penetapan standar biaya apakah PTN BH, PTN BLU, PTN Satker serta PTS bahwa Kemenristek, *eh*, Kemendikbudristek hendaknya melakukan penyusunan

standar-standar pembiayaan operasional jenjang pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta. Selanjutnya diajukan ke Kementerian Keuangan sehingga menjadi satu kesatuan dalam standar biaya masukan. Karena bagaimanapun juga sebenarnya negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, jadi bukan hanya negeri memiliki fokus pemerintah, tetapi juga swasta sebaiknya menjadi perhatian itu. Kemudian yang kedua detailnya standar-standar pembiayaan pendidikan akan mempermudah perencanaan dan pengalokasian bantuan dana pendidikan negeri maupun swasta.

Kemudian yang ketiga, para pemangku kepentingan pendidikan belum mendapatkan informasi mengenai kemampuan keuangan negara tentang wajib belajar 12 tahun. Kami memiliki pandangan dari hasil pertemuan kami dengan pengurus, yang pertama Kemenristek, Kemendikbudristek perlu mensosialisasikan secara lebih masif tentang kemampuan keuangan negara untuk pemenuhan kebutuhan akses pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Khususnya sekolah-sekolah swasta yang tergolong kluster binaan untuk memperoleh layanan pendidikan. Jadi kami fokus pada kluster binaan yang swasta, sehingga mereka mendapatkan hampir, mungkin tidak sepenuhnya, tetapi mendekati apa yang menjadi kebutuhan sekolah-sekolah swasta.

Kemudian yang keempat, tentang pemerintah daerah ini yang kami katakan di awal, hampir tidak tersentuh, terutama kami yang di swasta. Meskipun kemampuan pemerintah daerah yang beragam, namun sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) bahwa pemerintah daerah juga punya tanggung jawab terhadap pendidikan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pemerintah daerah juga wajib untuk memenuhi 20% anggaran. Maka sebaiknya mungkin ada seperti apa solusinya terhadap pemerintah-pemerintah daerah ini, agar wajib belajar 12 tahun juga untuk khususnya swasta, pemerintah daerah memiliki peran fungsi pendidikannya.

Kemudian masih banyak juga keluhan dari sekolah-sekolah terkait dengan keterbukaan anggaran pendidikan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga masih ada sekolah-sekolah yang tergolong kluster binaan belum mendapatkan sama sekali bantuan pembiayaan pendidikan sesuai dengan kewajiban pemerintah daerah, itu.

Kemudian yang kelima terkait dengan skema perencanaan, belum adanya skema perencanaan pelaksanaan dan pelaporan penggunaan program bantuan pendidikan yang mudah dipahami. Sebaiknya Kemendikbudristek perlu membuat skema perencanaan pelaksanaan dan pelaporan penggunaan program bantuan pendidikan yang lebih mudah dipahami, mudah dipahami kemudian dilaksanakan dan sekaligus disosialisasikan secara masif kepada para pemangku kepentingan pendidikan, sehingga mengurangi resiko menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan, ini yang sering terjadi di bawah.

Kemudian terkait dengan pertanyaan dan tanggapan pemangku kepentingan masyarakat kami mohon Pak Wayan Jondro bisa memberikan penekanan sehingga pada akhir pandangan kami juga Pak Wayan yang akan memberikan kesimpulan.

Demikian pimpinan sidang.

Selanjutnya kami mohon Pak Wayan Jondro bisa melanjutkan.

PARISADA HINDU DARMA INDONESIA (PHDI) (Dr. Ir. I WAYAN JONDRA, M.Si.):

Mohon izin Pimpinan Sidang,

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera,

Bersama ini saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Bidang Pendidikan, bahwa kami di selaku Majelis Umat Hindu ya. Sebenarnya kami punya satu perguruan tinggi yang kita miliki yaitu Universitas Hindu Indonesia kayaknya Pimpinan Sidang juga pernah ke situ baru.

KETUA RAPAT:

Negeri?

PARISADA HINDU DARMA INDONESIA (PHDI) (Dr. Ir. I WAYAN JONDRA, M.Si.):

Universitas Hindu Indonesia di Denpasar.

Iya, *nggih*.

Ini seperti yang dikhawatirkan oleh saudara kami dari Kristen juga bahwa peserta didik kami kian hari kian turun ya, semenjak ada kebijakan-kebijakan perekrutan mahasiswa di sekolah negeri yang nyaris tanpa batas. Misalnya UNHI di, di awal Covid itu mahasiswa barunya sekitar 2.000-an, *nah* sekarang terus turun, turun ya, tahun lalu itu 600 dan tahun ajaran terakhir ini hanya 400 orang mahasiswa barunya kurang 400 orang, lebih sedikit. *Nah*, jadi ini membuktikan bahwa peminatan terhadap sekolah apa, kampus swasta ini menurun ya. Jadi ini tentu ini hal ini memang sangat mengkhawatirkan kami dari majelis.

Kemudian kami langsung masuk kepada pokok-pokok pertanyaan.

Yang pertama tanggapan kami dengan, terhadap PIP, BOS, DAK dan lain-lain ya. Selama ini kami sebagai majelis keagamaan Hindu bahwa kami banyak mendapat informasi dari masyarakat tentang rakyat miskin yang

selama ini banyak mengalami kesulitan untuk mengakses PIP karena yang harus memenuhi syarat mendapat PIP itu adalah yang satu:

1. Peserta program keluarga harapan atau PKH, Peserta pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau (KKS);
2. Berstatus yatim piatu atau salah satu di antaranya, kemudian dari,
3. Panti asuhan panti sosial atau sekolah, ya,
4. Kemudian yang keempat adalah terdampak bencana alam.

Sedangkan mereka tidak termasuk dalam persyaratan itu ya. Tapi faktanya mereka tidak mampu membiayai anaknya untuk sekolah akibatnya mereka putus, karena orang tuanya putus kerja yaitu PHK berbagai alasan termasuk PHK saat Covid yang hingga kini belum pulih 100%. Sehingga mereka yang sebelumnya tidak masuk di antara empat itu akhirnya tidak mampu menyekolahkan anaknya.

Itu kemudian yang berkaitan dengan yang selanjutnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang 20 tentang Sisdiknas ya, Pasal 30 ayat (4), Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman dan ini pasraman ini kami Pak, kemudian pabaja, maaf, Pabbaja Samenera dan bentuk lainnya yang sejenis.

Pasraman yang selama ini ya, yang kami lakukan secara mandiri mungkin bahkan itu dilakukan di pura gitu ya, karena untuk mengakomodir apa, para pelajar kami Pasraman selama ini sudah melaksanakan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk PAUD dan sekolah di bawah naungan Kemdikbudristek.

Program yang dirancang Kemdikbudristek ini sebagai bagian dari kurikulum merdeka untuk bertujuan mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila. Sehingga masukan kami berkaitan dengan pertanyaan ini Pimpinan Sidang, kami berharap Komisi X DPR RI berkoordinasi kepada Kemendikbud agar peserta PIP dapat direkomendasikan juga oleh majelis umat, yang selanjutnya bisa diverifikasi oleh Kemdikbud.

Yang kedua, kami berharap Komisi X DPR RI menginisiasi penyusunan regulasi yang mengakomodir, khususnya masalah pembiayaan program-program bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program P5 di pasraman ini.

Yang kedua, berkaitan dengan implementasi program merdeka belajar. Pembiayaan pasraman yang bersifat mandiri berdasar, berdasarkan swadaya umat Hindu dan belum pernah mendapat pendanaan dari Kemendikbud *eh*, Ristek maupun dari Kemenag ya, dari pusat maupun daerah. Padahal pasraman selama ini sudah membantu Kemdikbudristek untuk melaksanakan pendidikan agama Hindu dan budi pekerti yang sebenarnya menjadi kewajiban pemerintah, serta menjadi hak peserta didik sebagaimana yang ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas Pasal 12 ayat (1), setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

a) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Masukan kami ke, kami berharap kepada Bapak-Bapak yang terhormat di Komisi X DPR RI untuk menjembatani kepada kami, kepada Kemdikbudristek untuk memberi pembiayaan pendidikan di pasraman ini, baik itu menyangkut honorarium maupun tenaga kependidikan SARPRAS.

Yang ketiga, yang berkaitan dana alokasi, bagaimana pola koordinasi ya, koordinasi yang berjalan selama ini, hanya terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti, pemberian pendidikan agama dan budi pekerti kepada satuan pendidikan yang tidak ada kaitannya dengan dengan pendanaan ya.

Yang keempat, kami perlu sampaikan belum ada pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh kemdikbud untuk pelaksanaan pendidikan di pasraman ya ini, sehingga tentu kembali lagi kami mohon untuk diperjuangkan hak dari peserta didik ini.

Yang kelima substansi apa yang perlu dikonstruksi ya, perlu kami jelas, sampaikan bahwa hak dari peserta didik wajib dipenuhi oleh negara sesuai dengan Undang-undang Sisdiknas ya.

Yang pertama, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dua, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana, guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun.

Mungkin dari awal tadi kami cukup banyak yang kami sampaikan perkenankan kami menyampaikan kesimpulan kami atas apa-apa yang sudah kami sampaikan.

Yang pertama bahwa kami di pendidikan swasta, baik itu sekolah maupun pendidikan tinggi kalau berurusan kualitas itu pasti seiring sejalan dengan biaya. Dengan demikian perlu ada standarisasi pembiayaan pembiayaan sehingga perelakuannya sama, baik itu swasta maupun pemerintah swasta maupun negeri maksud kami ya. Kalau memang pendidikan-pendidikan yang bergengsi yang sifatnya elit *gitu* kalau di rencana pemerintah dipungut PPN itu sangat bagus, yang penting nanti hasilnya juga digunakan untuk menunjang, mensubsidi, institusi pendidikan lainnya.

Nah tentu yang kedua yang yang diinginkan senada dengan saudara kami masalah *political will*. Mungkin kami perlu merujuk kepada hasil-hasil akreditasi. Ya mungkin, yang selama ini akreditasi itu justru ada yang kurang mencerminkan keadaan riil. Karena seolah-olah kalau akreditasinya buruk dianggap kinerja pemerintah daerah tersebut buruk. Padahal mestinya akreditasi itu harus menjadi sebuah instrumen untuk dalam *supporting* dana.

Misalnya kalau yang unggul ya dikasih *reward*, kalau yang kurang harus di *support*, baik itu tenaga pendidikannya maupun, tenaga kependidikan maupun SARPRAS-nya. Ini yang perlu dilakukan reorientasi atau pemaknaan ulang terhadap akreditasi, *eh* institusi pendidikan.

kemudian yang ketiga, bahwa kalau kita merujuk pada Undang-undang Sisdiknas, bahwa pendidikan ini menjadi hak warga negara, paling tidak pemerintah harus memiliki suatu, tidak hanya berpedoman pada ke 20%-nya, tapi ada hal lain yang perlu harus dibiayai dasar-dasarnya. Itu artinya apa? Karena ini pendidikan menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi paling tidak tidak baik sekolah swasta maupun negeri, pendidikan tinggi swasta maupun negeri, itu tenaga kependidikannya, tenaga pendidikan itu minimal itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan kami dari masyarakat ini hanya menyediakan tempatnya, tapi kewajiban memberikan pendidikannya tetap dari pemerintah. Kalau sifatnya SARPRAS mungkin bisa bantuan ya, kalau bantuan ya sesuai dengan apa situasional sifatnya.

Dan yang keempat, bahwa pendidikan kami di Hindu mengkoordinasikan ada 108 sekolah Widyalyaya di seluruh Indonesia yang selama ini berada di bawah Kemenag ya. Ya mungkin masih belum mendapat, kami merasa masih belum mendapat perhatian yang serius untuk kemajuan anak-anak didik di situ. Sehingga, ini perlu lagi kami harapkan ada sebuah kebijakan-kebijakan untuk *men-support* kesetaraan kualitas pendidikan di sini.

Kemudian yang kelima, kesimpulan kami yang kelima, berikan kemudahan masyarakat untuk mengakses PIP. Kami dari majelis umat siap untuk membangun MoU sehingga diberi kewenangan untuk merekomendasikan. Silakan nanti kalau sudah kami direkomendasi memberikan rekomendasi nanti *eh* Kemenag, *eh kok sorry*, Kemendikbud yang memverifikasi lagi ya, memverifikasi apakah itu benar, kebenarannya sejauh mana *gitu*. Karena umat kami yang di pedalaman itu, jangankan untuk untuk mengakses, ke kantor desa *aja* dia masih butuh biaya ya. Sehingga mereka tidak me apa, tidak memprosesnya padahal itu menjadi hal yang penting. *Nah* kalau ini peluang ini dibuka, kami yakin akan semakin banyak umat kami yang bisa meningkatkan kualitas hidupnya dengan meningkatkan kualitas pendidikan.

Demikian Bapak Ibu Pimpinan Sidang.

Kami mohon maaf apabila yang ada, yang kami sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Ibu.

Terima kasih.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Om shanti shanti shanti om.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak.

Sudah semua ya rasanya?

Menarik sekali *nih*, catatan dari kawan-kawan terutama yang PIP ya kawan-kawan. Ini PIP ini begini kemarin baru saja ada pengawasan fungsi pengawasan rekomendasi dari KPK bahwa banyak dianggap PIP tidak tepat sasaran, karena harus mengacu kepada DTKS. Padahal kan tadi Bapak-Bapak juga mengatakan masih banyak masyarakat yang membutuhkan yang tidak masuk di dalam data DTKS.

Nah, kami ingin Bapak-Bapak juga nanti memperkuat kepada Kemendikbud bahwa sebetulnya ya PIP ini bukan hanya hak DTKS saja, tapi masih juga masyarakat yang posisinya berada pada garis sejahtera. Artinya mungkin untuk sekedar hidup bisa tetapi untuk kegiatan-kegiatan lain juga mungkin masih kurang ya.

Saya menangkap dari Bapak-Bapak Ibu semua tadi sampaikan *source*, sumber pendanaan tadi belum diungkapkan. Tapi *nggak papa* nanti *biar* dialami oleh kawan-kawan ya.

Lalu kemudian juga yang kita belum pahami, apakah dari pihak swasta mendapatkan BOPTS (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta)? Karena laporannya dari Kementerian Pendidikan juga mengatakan ada BOPTS ya, *plus* juga apakah sekolah-sekolah ini *domain*-nya ke Kemenag atau ke Kemendikbud?

Karena kita pahami ada yang kita tidak bisa masuk ke dalam jaringan Kemenag, sambil nanti Bapak-Bapak siapkan jawabannya, kami persilakan anggota di sini untuk memberikan tanggapan.

Pak Putra.

F-PDIP (PUTRA NABABAN):

Baik pimpinan terima kasih.

Pertama-tama kita mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber dari PGI, KWI, Walubi dan PHDI dan menurut saya masukannya ini sangat relevan dan juga waktunya tepat ya dengan kondisi riil yang ada di lapangan sekarang. Khususnya terkait dengan kisruh pembiayaan pendidikan yang kita hadapi berapa waktu terakhir ini dan kita tentunya tidak akan henti di Komisi X memberikan apresiasi kepada adik-adik mahasiswa yang memang mereka berjuang untuk adik-adik kelasnya supaya masalah biaya pendidikan yang mahal ini.

Kalau tadi Prof menyampaikan kata-kata yang sangat tajam ya dan cukup apa namanya menukik terkait dengan neo liberalisasi ekonomi pendidikan yang masih tidak terkontrol dan juga *profit oriented*. Kalau saya masih jadi wartawan saya bingung milih *headline*-nya yang mana *nih* jadi judul, semuanya bagus judulnya ya, dan langsung menukik ke jantung pemerintah gitu ya menohok ya. Andaikan disampaikan dua hari, dua hari yang lalu, ini kita gunakan waktu ketemu dengan Mendikbudristek kemarin.

Saya menangkap Pimpinan dan teman-teman Anggota yang terhormat di sini, saya menangkap ada benang merah dari empat lembaga ini, yang sepertinya ingin meneriakkan, bukan sepertinya ya, sudah meneriakkan bahwa ada kesetaraan. Kesetaraan yang selama ini didengung-dengungkan oleh Menteri Pendidikan, dalam hal ini pemerintah, bahwa dia bukan menteriya perguruan tinggi negeri atau sekolah negeri, tapi juga swasta dan kalau saya lihat bagaimana Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ya. Saya bersyukur ada Ibu juga hadir di sini karena kalau Bapak-Bapak semua bisa garing kita ini ya. Jadi saya bersyukur sekali, karena apa namanya, masukan-masukan yang disampaikan ini sangat komprehensif.

Meskipun tadi Pimpinan meminta beberapa poin lagi, tapi menurut saya dari rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan ini bisa menjadi bahan yang menurut saya sudah lumayan cukup ya, untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan pemerintah khususnya memang bukan hanya Kementerian Pendidikan. Tapi juga dalam hal ini Bapenas dan Kementerian Keuangan. Kalau tadi ada pertanyaan tentang alokasi dana pendidikan *mandatory* 20% itu lari ke mana, ada ke mana? Memang betul 15% cuman ada di Kemendikbud, 52% dana transfer desa. Sebentar, 9% ada di Kemenag dan kementerian-kementerian lainnya. Ini yang menurut saya teriakkan yang yang disampaikan oleh PGI bahwa 20% APBN itu harusnya di-*mandatory*, dikelola oleh Kementerian Pendidikan, ini betul-betul yang kita juga suarakan kemarin.

Nah, ini saya mengucapkan terima kasih dulu ini kepada narasumber karena masukan-masukannya dan kita di sini memang selalu terbuka, Bapak Ibu semuanya, dengan perguruan swasta dan bahkan ini luar biasa di awal kerja dari panitia kerja pendidikan yang kita undang adalah lembaga-lembaga swasta gitu, ya. Ini kehormatan buat kita karena kita tidak pernah membedakan, apalagi di dapil, ya di daerah pemilihan. Boro-boro kita ngelihat soal swasta atau negeri, kita *nggak* ngelihat suku, agama, ras, kita *nggak* lihat. Dalam membantu memperjuangkan pendidikan beasiswa mereka gitu, ya. Kenapa? Udah pemilunya sudah lewat, Kang Dede.

Nah, ini juga saya merasakan juga berterima kasih, Pimpinan, dalam hal ini banyak sekali organisasi swasta di sini atas kontribusi dan peran dari sekolah-sekolah swasta di seluruh Indonesia ya terutama di daerah 3T yang tidak kenal lelah meskipun kondisinya megap-megap gitu, ya. Terus juga sempat diberikan janji P3K, tapi kemudian ditarik ke negeri, kami merasakan itu juga. Jadi, Bapak-Ibu sekalian yang disampaikan ini *nih* bukan bukan omong kosong ini, ini bukan karang-karang, kertas-kertas ini. Ini kami juga merasakan di Dapil.

Kalau kemarin ngomong P3K, gurunya itu diambil ke negeri itu terjadi di Jakarta Timur terjadi, ya. Kepala sekolahnya, yayasannya gigit jari. Mereka sudah dengan semangat mendaftarkan gurunya karena *nggak* tahu tadinya, untuk kesejahteraan. Tapi, setelah diangkat tidak mengajar di situ, mereka diprotes oleh orang tua karena banyak guru favorit. Ini ini betul, ini kami rasakan dan kebetulan di DKI kita sudah melakukan berapa beberapa komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak kepala daerah dan lain sebagainya, sudah bisa menemukan solusi. Sehingga, tidak tidak harus apa namanya? Dia harus pindah ke ke sekolah yang lain.

Sekali lagi, Pimpinan. Ini saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena ini sudah beberapa yang sangat dalam dan sangat kritis. Cuma saya titip *aja* satu hal, mungkin pemikiran juga, terkait dengan PTN BH ya, saya kok merasa bahwa ini sudah bagus, saya setuju soal PTN BH dihapuskan ya, dan juga saya sangat senang sekali kalau universitas negeri fokus ya, fokus kepada kualitas bahkan sampai mengatakan tadi fokus pada nobel gitu ya, fokus pada nobel. Kebetulan, tahun 95 waktu Uskup Belo dapat nobel, saya yang meliput di sana. Tahun 95 di Norway, di Oslo ya dengan Ramos Horta, ya jadi bisa dirasakan apa? Fokusnya.

Namun, kalau misalnya tetap PTN BH, memang yang kemarin saya sayangkan adalah kenapa pembiayaan universitas-perguruan tinggi itu hanya dibebankan pada UKT dan IPI? Harusnya, Rektor sebagai CEO juga bisa menemukan sumber lain, jangan cuman membebankan kepada apa namanya, UKT saja gitu. Jadi, ini ini sangat tidak tidak sinkron sekali ketika dibuka menjadi PTN BH, tapi pimpinan dari perguruan tinggi itu tidak punya kemampuan, ya untuk mencari sumber pendanaan lain di luar pembebanan terhadap UKT dan juga membuka kelas apa, apa? Pendaftaran yang yang yang yang yang yang yang luar biasa besarnya, gitu. Ini ini menjadi menjadi PR juga.

Dan yang terakhir, ini saya mau bicara juga soal dana BOS, ini yang terjadi di dapil juga. Ini kadang-kadang kalau dana BOS ini, tapi ini *saya nggak* nyebutkan ya, nyebutkan yayasannya apa, sekolahnya apa, segala macam, ini seringkali yang saya temukan di lapangan ada ketidakkompakan *nih* antara yayasannya dengan pengelolanya, gitu. Sehingga, dana BOS yang disalurkan ini tidak optimal digunakan, ya. Artinya, yayasannya tidak percaya sama sekolahnya, sekolahnya tidak yakin yayasannya bisa *ngelola*, dan lain sebagainya. Ini ini beberapa beberapa kali terjadi, gitu *loh*.

Ya jadi, yang jadi korban adalah anak-anak, yang jadi korban adalah guru-guru. *Nah*, ini mungkin realitas ini juga perlu dilihat, bagaimana pengelolaan dana BOS ini ada kekompakan di antara yayasan dan sekolah di dalam me apa? Menggunakannya untuk program-program prioritas yang ada di sekolahnya. Saya rasa itu, Pimpinan. Sekali lagi terima kasih atas masukannya.

Merdeka.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Putra.

PTN BH itu, kalau saya tidak salah, amanat Undang-Undang Perguruan Tinggi. Tetapi, semangat PTN BH itu adalah kemandirian, yang yang ada malah mungkin neoliberalis atau apapun juga yang tadi disampaikan, ya.

Baik. Berikutnya Pak Nur Purnamasidi yang kemarin viral *ngomel-ngomelin* menteri juga. Banyak di YouTube, Pak.

F-PG (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI) :

Sebelah saya lebih viral *nih*, Bu Anita.

Terima kasih, Pimpinan.

**Bapak-bapak saudara sekalian,
Dari PGI,
Dari PHDI,
Dari WALUBI,
Dari KWI, yang saya hormati,**

Apa yang Bapak-bapak sampaikan terjadi di Dapil saya, Pak. Kebetulan, di dapil saya di Lumajang itu, di Senduro itu ada banyak teman-teman dari Hindu, kemudian ada teman-teman juga dari Katolik juga. Ada SMA, ada SD segala macam yang hampir 15 tahun ke belakang, setiap tahun dari jumlah siswanya itu memang hanya dapat PIP itu satu, maksimal 3 orang dari 100 lebih siswa yang ada. Jadi, apa yang Bapak-Bapak *dah* terus sampaikan itu, *nggak* usah jauh-jauh, di Jawa pun masih sebenarnya masih belum ada pemerataan, gitu.

Kadang-kadang, memang karena stigma ini lebih dekat dengan agama, sehingga kemudian kewenangannya itu dilemparkan ke Kementerian Agama. Saya dulu pernah di Komisi VII, Bapak-bapak, dan memang tidak seagresif Kemendikbud dalam konteks bagaimana memperjuangkan anggaran pendidikan, ya. Jadi, saya memperjuangkan anggaran pendidikan untuk sekolah-sekolah agama di Kementerian Agama, ketika di Komisi VIII. Itu responnya tidak terlalu baik, lain dengan kemudian waktu di Kemendikbud. Makanya kemudian, kemarin ya kami diprotes, kami di komisi X diprotes di daerah “kenapa PIP lebih banyak di sekolah umum dibanding sekolah agama?”.

Nah karena itu, maka itu menjadi muncul gagasan saya, waktu itu saya sampaikan, kalau begitu kayaknya pendidikan ini harus ditempatkan di satu lembaga pendidikan sendiri, satu kementerian, jangan dipisah ada umum ada agama. Itu penting, itu satu.

Yang kedua, harus kemudian pendidikan ini disentralisasi tidak diotonomisasi. Bagi daerah yang kaya, misalnya kayak daerah saya, di Lumajang lebih banyak anggarannya. Tapi kemudian, ketika ke Bondowoso misalnya, dia *nggak* bisa karena memang sumber sumber pendapatan daerahnya tidak sebanyak yang ada di kabupaten.

Nah, sehingga kemudian saya sampaikan lagi isu baru, menurut saya pendidikan *nggak* boleh diotonomisasi, dia harus disentralisasi. *Nah*, karena itu kemarin saya sampaikan ke pimpinan, kayaknya kita perlu buat Panja untuk standarisasi biaya pendidikan. Sehingga, yang menentukan biaya pendidikan itu pusat bukan daerah. *Nah nah*, cuma kita memang membutuhkan.

Jadi, Bapak-bapak kami undang sesungguhnya adalah, tadi, keunikan-keunikan ini *kan* ada, di daerah-daerah terpencil segala macam itu. Sesungguhnya, tadi saya datang, Pimpinan, saya membayangkan saya *udah* dapet itungannya sebenarnya. Misalnya, di Papua di Gunung ini ya, komponen pendidikan itu apa saja? Biaya Pendidikan? Misalnya, buat transportnya, buat apa segala *macem*. Sehingga nanti, ketika kita menentukan BOS misalnya, BOS di Papua di kabupaten ini jumlahnya sekian per anak, per siswa untuk SD, misalnya. Jadi, satu Papua pun nanti nominal BOS itu, itu *nggak* sama. Kalau sekarang *kan* disamakan. Yang mau di atas gunung, di bawah gunung di tengah kota, sama.

Nah, sebenarnya kami berharap mumpung ini dari pengurus ada dari Hindu, ada dari Buddha, dari Katolik, dari Protestan, mudah-mudahan ke depan kami bisa diberikan model perincian. Kira-kira standarisasi biaya itu mencakup apa saja di daerah-daerah? Ya, mungkin nanti dengan keunikan itu akan berbeda. Yang di sini mungkin standarisasinya itu bisa 10 *item*, tapi di sini mungkin 12 *item*, di sini mungkin 20 *item*.

Kenapa kami, saya saya menyampaikan ini ke pimpinan waktu itu? Karena jujur *aja* Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kami di Komisi X sampai sekarang ini belum mampu meyakinkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk mewujudkan *mandatory* 20% anggaran pendidikan, ya. Kita belum belum mencapai 665 triliun itu, tidak murni untuk tadi yang *panjenengan* sampaikan itu, untuk banyak hal-hal lain, tidak ada kepentingan secara langsung menyangkut pendidikan. Dalam bahasa Menteri Keuangan kita adalah fungsi pendidikan, termasuk jalan, membangun jalan jembatan itu fungsi pendidikan. Ya, itu bener, tapi menurut saya *kan* kita ada prioritas.

Nah, termasuk sekarang misalnya, banyak P3K yang *nggak* diangkat karena daerah tidak bisa memenuhi formasi, karena apa? Karena anggarannya kurang. *Nah*, karena itu pun saya sampaikan lagi ke Pimpinan, kita juga harus perjuangkan. Guru ini seharusnya statusnya adalah pegawai pusat, bukan lagi pegawai daerah, sehingga standarisasinya sama. Kalau masih tetap daerah, juga *nggak* akan bisa. Jadi, makanya kenapa kemudian pendidikan ini menurut saya harus ditarik menjadi urusan pusat bukan urusan daerah lagi.

Nah jadi poinnya, Bapak-Bapak, mudah-mudahan kami bisa dibantu untuk membuat apa? Beberapa *itungan* yang berbeda. Misalnya, di Papua daerah mana, Kalimantan daerah mana, segala *macem*. Sehingga, nanti itu menjadi rujukan kami di Panja ini untuk mengusulkan, “ini *loh* komponen biaya di masing-masing daerah ini berbeda, inilah instrumennya, dan angkanya pun akan berbeda”. Sehingga tadi, tentang kesetaraan segala macam itu akan tercapai. Kalau tidak ada ukuran yang kita sampaikan, nanti dianggap sama saja. Kan kalau menurut saya, pemerintah kita itu kan pakai ekonomi makro bukan ekonomi mikro, satu tambah satu dibagi sekian sama dengan rata-rata, ada itu aja kan.

Nah, itu menurut saya tidak memenuhi aspek keadilan, karena keadilan bagi saya itu penting hari ini dan di pendidikan menurut saya penting. Sehingga, orang walaupun apa? Mengajar di daerah tertentu, tapi dia akan merasa diperlakukan adil, karena memang ongkos untuk melaksanakan pendidikan itu betul-betul dipenuhi oleh oleh pemerintah.

Jadi sebenarnya itu, Bapak-Bapak. Jadi, kita punya 665 triliun, kemudian juga ada PP 18 2022 yang memang sentrumnya itu ada di Kemendikbudristek. *Nah*, cuma sampai sekarang kita belum punya ukuran yang pas yang adil menyangkut komponen biaya tadi itu. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu-Ibu bisa membantu kami, sehingga nanti di Panja ini bisa menghasilkan *itungan-itungan* yang lebih detail dan definitif.

Terima kasih, selamat sore, oh siang ya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Nur.

Bapak-Bapak sekalian,

Memang kalau harapan kami dalam Panja ini, kita hanya bisa bekerja 3 bulan, karena nanti akan masuk kepada masa Anggota DPR yang baru. Tapi, kami ingin hasil dari Panja ini nanti merekomendasikan kepada negara bahwa, seperti yang disampaikan Pak Nur tadi, kalau bisa pembiayaan pendidikan itu untuk, misalnya, untuk Dikdasmen itu *full* dibiayai oleh negara, untuk perguruan tinggi paling tidak 50% itu bisa dibiayai oleh negara.

Nah, tapi *kan* kita harus tahu komponennya, tadi yang dikatakan komponen-komponen, apakah ada biaya kemahalan di daerah 3T, ada komponen lain-lain *lah*. Nanti kami ingin bapak meng-*exercise* hal itu.

Berikutnya, silakan. Siapa lagi? Pak Prof? Bu Anita ada mau menyampaikan mewakili 3T? Ya, Pak Prof dulu, ya.

Silakan.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.)

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang saya hormati Pimpinan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X,
Rekan rekan Anggota,
Dan Bapak-bapak dari PGI, KWI, PHDI, dan WALUBI,
Yang saya hormati semua dan saya banggakan,**

Saya merasa mendapatkan banyak masukan mengenai pembiayaan pendidikan kita. Saya melihat APK, terutama ke perguruan tinggi ya, sebetulnya cukup baik ya APK kita masuk perguruan tinggi itu 40%, hampir 39 koma. *Nah* untuk kondisi yang ada sekarang, ini bisa dimaklumi angka itu. Tetapi kemudian, yang menurut hemat saya menarik adalah dari 39 koma sekian persen itu, 25%-nya adalah mahasiswa perguruan tinggi negeri, kemudian yang 75% adalah mahasiswa perguruan tinggi swasta. Dengan jumlah atau persentase yang lebih besar, 75%, ini tidak bisa serta merta diartikan bahwa perguruan tinggi swasta lebih lebih favorit, lebih diidolakan.

Sesungguhnya masyarakat kita itu, dengan kondisi yang ada sekarang, jujur saja masih menjadikan perguruan tinggi negeri sebagai pilihan sebagai pilihan. Walaupun beberapa perguruan swasta, dalam perkembangannya, menurut hemat saya sudah semakin bagus. Ada perguruan tinggi swasta yang justru lebih favorit dari pada perguruan tinggi negeri, itu sudah ada itu. Tetapi, *in general*, secara umum perguruan tinggi negeri masih menjadi apa namanya? Tumpuan, harapan Masyarakat. Mengapa? Karena dianggap lebih lebih murah itu ya, lebih terjangkau.

Tetapi, kemudian tiba-tiba ada kenaikan UKT belakangan ini, kenaikan UKT yang kenaikannya luar biasa. Sebetulnya, gejala ini sudah dirasakan ketika kemudian perguruan tinggi ini lebih diarahkan kepada PTN BH, di mana kemudian ada ruang masuknya mahasiswa melalui jalur mandiri. *Nah*, jalur ini memberi kesempatan kepada perguruan tinggi masing-masing menaikkan biaya kuliahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing, gitu. Dan ini yang jadi persoalan itu ya, sekarang menjadi persoalan.

Saya juga pernah menjadi rektor ya, ada satu pertanyaan mahasiswa baru saya waktu itu. "Pak rektor saya masuk perguruan tinggi ini perguruan tinggi saya adalah Universitas Muhammadiyah di Surabaya, saya masuk ke sini setelah tidak diterima oleh perguruan tinggi negeri", itu. "Pertanyaan saya, ini yang menarik, "pertanyaan saya, apa yang mau dilakukan oleh pak rektor supaya saya kuliah di sini, kualitas saya tidak kalah dengan yang kuliah di perguruan tinggi negeri"? *Nah* kalau Bapak Rektor ditanya pertanyaan seperti ini, kira-kira jawabannya seperti apa ya?

Pada saat itu jawaban saya begini, "ini pertanyaan yang sangat cerdas", gitu *loh*. "Pertanyaan yang sangat cerdas dan saya heran orang secerdas kamu tidak diterima di perguruan tinggi negeri" itu. "Oleh karena itu, *udah* tepat Anda

milih Universitas Muhammadiyah Surabaya, kumpul dengan orang-orang yang cerdas". Saya tanya, "anda tahu Perguruan Tinggi Negeri UNAIR-kah, ITS-kah, IGM-kah dan seterusnya". "Ya tahu, Pak". "Besar apa kecil itu?". "Ya besar, Pak" gitu, ya. "Ya, saya ngasih tahu ya. Kalau Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ditugaskan menjadi rektor perguruan tinggi negeri, itu akan jauh dua atau tiga kali lipat lebih besar". Mahasiswa saya tadi itu juga tertawa senyum seperti Bapak itu, senyumnya senyum kecut, gitu loh, seperti *ndak* percaya. Saya membayangkan jadi rektor universitas negeri itu apa sulitnya? Apa sulitnya, ya? Dosen sudah digaji, infrastruktur sudah disiapkan, *nggak ngurus* pajak, PBB, dan seterusnya. Anggaran *ndak* diusulkan, ya anggaran tahun lalu berlaku.

Jadi, rektor perguruan tinggi negeri *nggak* mikir, terlalu mikir soal anggaran, yang dipikir bagaimana menghabiskan, *kan* begitu, Pak ya? Untuk jadi rektor sebuah perguruan tinggi swasta menjadi besar, itu harus ada etos kerja, kaki untuk kepala kepala untuk kaki. Kalau *ndak* bisa, *ndak* bisa perguruan tinggi swasta menjadi besar, *nggak* bisa. *Nah*, itu etos kerja.

Saya bilang kepada mahasiswa baru saya tadi, "Etos kerja itulah yang ingin kami kasihkan pada Anda. Anda kuliah di sekolah, perguruan tinggi negeri, kalau *ndak* punya etos kerja, ilmu mu banyak, Anda bakal, tidak bakal sukses. Anda ingin pintar, apa ingin sukses"? *Ah* baru kemudian tepuk tangan, Pak itu Pak.

Apa yang ingin kami katakan ialah sebenarnya PTN BH itu maksudnya bagus, supaya ada kemandirian, seperti yang dimiliki oleh rektor-rektor perguruan tinggi swasta. Sehingga kemudian berkembang, modal yang diberikan oleh pemerintah itu bisa dikembangkan. Sehingga kemudian, berkembanglah sebuah perguruan tinggi yang tidak hanya berbasis UKT. Perguruan tinggi kita berbasis UKT, harusnya punya sumber-sumber lain sumber-sumber lain.

Riset itu juga harus bisa mendatangkan mendatangkan sebagai *earning vehicle*-nya perguruan tinggi, gitu, harusnya seperti itu. Tetapi *kan* yang terjadi kemudian membuka jalur penerima mahasiswa sebanyak-banyaknya, kemudian dengan UKT setinggi-tingginya, itu yang terjadi. Ini yang menurut saya yang harus dievaluasi dan masukan Bapak-Bapak, saya kira itu sangat penting.

Satu hal lagi yang ingin mendapatkan dukungan dari Bapak-bapak ini, mendorong Komisi X supaya bisa punya *pressure* yang cukup untuk bisa mengevaluasi postur anggaran 20% *mandatory* itu. Ini yang perlu kita bersama-sama terus suarakan, itu. 20 kementerian, lembaga yang ada di negeri ini, mereka punya kurang lebih 170-an sekian lembaga pendidikan, dialokasikan anggaran sekitar 32 triliun atau 5% dari 20% anggaran pendidikan kita dan itu Kementerian Pendidikan Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tidak punya kemampuan untuk mengkoordinasikan, apalagi melakukan pengawasan.

Walaupun ada PP yang mengatur standar-standarnya tidak boleh berbeda dengan yang dibuat oleh Kemendikbud, tapi faktanya tidak bisa melakukan koordinasi dan pengawasan. Sehingga kemudian, kualitas pendidikan kita kemudian seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini.

Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Prof Zainudin.

Beliau ini mantan Rektor Muhammadiyah. Jadi kalau jadi Rektor PTN, *nggak* perlu repot-repot ya, semua ada.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.)

Semua ada.

KETUA RAPAT:

Semua ada. Tapi *kan*, kenyataannya sekarang malah tidak, Pak. Apa jangan-jangan karena rektor pilihan 35% adalah slot menteri itu, ya?

Silakan, Ibu Anita. Suara dari timur.

FPD (ANITA JACOBA GAH, S.E.)

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

Bapak-Bapak yang saya hormati,

Kita semua sadar bahwa kita ketika kita bicara soal biaya Pendidikan, ini menyangkut tanggung jawab kita, ya Pak ya? Baik kami sebagai anggota DPR maupun Bapak-Bapak sebagai tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dalam agama.

Nah, kalau saya *sih* melihatnya, Pak Pimpinan dan Bapak-Bapak sekalian, Bapak-Ibu Anggota Komisi X, ini pemerintah kalau kita bisa mengatakan bahwa pemerintah, kalau menurut saya ya, pemerintah belum betul-betul menjalankan amanat undang-undang dan Pancasila khususnya sila ketiga “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Seharusnya, iya iya iya sila kelima. “Persatuan Indonesia” sila ketiga, ya Pak ya? Artinya ketika kita bicara bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ini pemerintah harusnya memegang teguh untuk pada saat mau

melakukan realisasi anggaran atau menentukan anggaran. Ya, tentunya pemerintah dengan DPR. *Nah*, sering kali kami, komisi X, itu sudah menunjukkan *eh* mengingatkan kepada pemerintah bahwa tidak boleh ada diskriminasi anggaran antara swasta dan negeri kalau kita mau bicara soal keadilan. Ya Pak ya?

Nah, tapi inilah yang terjadi. Oleh sebab itu, Pak Pimpinan, saya merasa bahwa di dalam Panja ini yang kita harus tekankan kepada pemerintah nanti, mari pemerintah harus bisa melaksanakan ini, mewujudkannya ini seperti apa? *Nah*, kita lihat daerah-daerah 3T itu pasti berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa, beda sekali ya Pak ya?

Seperti teman-teman saya tadi sudah kemukakan, bahwa kebutuhan di daerah 3T, sekolah-sekolah baik tingkat sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi, itu berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa ini. Artinya, kebutuhannya itu berbeda, kebutuhannya sangat berbeda dan ketika itu direalisasikan anggarannya, kadang-kadang ada juga yang tidak tepat sasaran, ya. Banyak sekolah-sekolah swasta yang berteriak juga kepada kami bahwa “apakah kami sekolah swasta ini bukan anak Indonesia sampai kami kok tidak diperhatikan”. Ya. “Apakah hanya negeri saja”?

Walaupun memang, kita ketahui masih banyak juga Pak, sekolah-sekolah negeri, perguruan tinggi negeri juga yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah. Tetapi seharusnya, paling tidak pemerintah bisa hadir untuk apa ya? Sebagai penengah, artinya jangan, jangan timpang, jangan terlalu jauh antara negeri dengan swasta. Memang kita akui negeri perlu, perlu mendapat perhatian, karena apa? Kita menggunakan dana APBN, betul. Tetapi, bukan berarti pemerintah meninggalkan atau istilahnya, ya swasta kapan diingat baru dibantu, gitu ya.

Nah oleh sebab itu, saya juga mohon nanti pada prioritas pembiayaan pendidikan ini, Pak Pimpinan dan Bapak-Ibu Dewan yang saya hormati, Bapak-Bapak yang hadir, nanti kita akan tekankan juga untuk prioritas pembiayaan pendidikan ini di daerah 3T dengan di daerah ini harus berbeda. Seperti yang dikatakan tadi bahwa komponen-komponen untuk pembiayaan itu harus menjadi perhatian khusus. Ya, contohnya seperti dana BOS, dipukul rata, padahal sekolah di daerah yang miskin beda, jauh lebih harusnya lebih tinggi dari pada sekolah-sekolah yang ada di perkotaan, ya.

Nah oleh sebab itu, demikian juga dengan guru-guru. Banyak guru-guru negeri di daerah terpencil juga Pak, yang sampai saat ini juga masih masih apa? Berteriak soal keadilan. Kadang-kadang tunjangan-tunjangan terpencil mereka juga jarang, terlambat dibayarkan. *Nah*, itu baru negeri apalagi yang swasta.

Jadi memang, masih banyak persoalan dalam pembiayaan pendidikan. Bicara soal kesejahteraan guru, bicara soal infrastruktur sekolah-sekolah, jalan menuju ke sekolah yang daerah-daerah sangat terpencil, *nah* itu juga harus menjadi perhatian kita, Pimpinan. *Nah*, ini juga membutuhkan perhatian,

bagaimana pemerintah bisa mengalokasikan anggaran, termasuk biaya-biaya pendidikan ini bukan hanya, mungkin hanya uang sekolah, tapi gedung-gedung sekolah juga masih banyak yang rusak, kesejahteraan guru juga masih banyak yang rusak, infrastruktur juga masih banyak yang rusak.

Saya sedih, saya dikasih kirim video guru-guru daerah terpencil bilang, “inilah jalan yang kami lewati, kalau banjir kami mesti puter satu dua gunung baru kami sampai ke sekolah tersebut”, sangat menyedihkan. *Nah* sementara tidak dikasih transport, misalnya, kendaraan bermotor atau perahu ketika mereka harus menyeberang. *Nah* ini kan sebetulnya harus menjadi perhatian kita semua. *Nah*, itu juga terjadi di sekolah-sekolah swasta, ya Bapak-Ibu.

Jadi sekali lagi, kalau dari saya Pak Pimpinan, kita harus menekankan bagaimana “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ini betul-betul terealisasi dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia ini, supaya jangan lagi ada diskriminasi anggaran antara sekolah swasta dan negeri. Walaupun memang kita tahu, negeri juga masih membutuhkan, tapi yang swasta pun harus ada beberapa komponen yang harus diberi dukungan anggarannya.

Mungkin dari saya itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Anita.

Memang Bu Anita itu kalau berhadapan dengan perguruan tinggi swasta agak adem, Pak. Kalau sama pemerintah agak sedikit.

Bu Lisda ada yang mau disampaikan? Silakan.

F.P. NasDem (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.)

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,*

**Yang saya hormati Pimpinan,
Dan seluruh teman-teman anggota Komisi X,
Yang saya hormati Bapak-Ibu nasumber dari PGI, KWGI, WALUBI dan
PHDI,**

Alhamdulillah senang sekali saya dapat bertemu dengan Bapak-Ibu narasumber semua yang sudah memberikan masukan yang luar biasa. Ini tadi kita baca dan akan terus kita baca sampai betul-betul ini bisa menjadi satu perjuangan yang betul-betul konkret untuk kami yang ada di Panja biaya pendidikan ini, khususnya.

Dan di tengah dari gelombang protes dari naiknya besaran UKT di sejumlah PTN yang sekarang ini, ya? Sedang apa? Sangat-sangat menjadi perhatian kita bersama dan banyak hal yang tadi Bapak-Ibu berikan masukan di sini. Ini juga sebenarnya sudah menjadi temuan kami di lapangan dan menjadi perjuangan kami di komisi X. Melalui Panja Biaya Pendidikan ini, tentunya, tadi Pak Pimpinan mengatakan kira-kira 3 bulan kita punya waktu untuk sama-sama memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak warga negara yang sudah dituangkan dalam undang-undang.

Namun, kalau kita melihat di lapangan masih banyak sekali ketimpangan, baik itu perbedaan antara di kota dengan desa atau daerah 3T, kemudian juga hak-hak dari para guru. Saya baru saja kemarin itu sidang terbuka S3 saya Pak, Ilmu pendidikan di UNP dan dengan disertasi saya itu mengenai model pelatihan kompetensi kepribadian guru. *Nah* di sana mulai dari penampilan, senyum. Waktu saya bilang senyum, mereka banyak yang protes, Pak. "Bagaimana kita bisa senyum, Bu?" katanya. "Kalau kita mau mengajar saja, untuk beli bensin saja itu masih menjadi permasalahan buat kami", seperti itu.

Dan mereka, jadi pada saat saya sidang, lebih pada saya mendengarkan aspirasi akhirnya, Pak. Ya, bukan apa namanya? Pertanyaan-pertanyaannya lebih kepada aspirasi yang memang harus, dalam hal ini, kami perjuangkan. Dan *alhamdulillah* saya diberi kesempatan di, menjadi salah satu Anggota Panja, sehingga saya berharap sekali bahwa kita masih terus bisa berkomunikasi secara lebih detil lagi, Bapak-Ibu. Ya, karena kita berharap ada keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kita yang cerdas tapi tidak punya kemampuan dari sisi biaya.

Mungkin demikian saja. Untuk kita bisa lebih lanjutnya nanti di dalam Panja-panja selanjutnya.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang.

KETUA RAPAT:

Ya, baik. Terima kasih, Ibu

Dan selamat untuk magister, doktornya untuk doktornya. Selamat Ibu, ya. Selamat datang di apa? Komunitas doktoral.

Anggota semua sudah? Baik.

Saya hanya menambahkan *aja*, tadi kami butuh bahan yang terkait sumber-sumber pendanaan. Mengapa? Karena kita ingin tahu kalau dari pihak kawan-kawan dari swasta, apakah dari yayasan atau mungkin dari apa namanya? *Eh* umat atau apapun juga, dan kemudian kira-kira berapa *sih* besaran *unit cost* kalau kita bebaskan per siswa pada level SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Jadi konsepnya begini, *unit cost* per mahasiswa per semester itu sebetulnya berapa *sih*? Ini yang kita belum tahu, ya.

Yang kedua, juga memang Bapak-bapak dan Ibu-ibu mungkin juga cukup memahami, saat ini ada batasan-batasan di mana pemerintah melalui Kemendikbud itu hanya fokus kepada pembiayaan pendidik, tenaga pendidikan dan juga mungkin fasilitas sederhana, sarpras untuk sekolah, bangunan, RKB ya, terus kemudian SSU satuan unit baru *eh* apa namanya? USB, itu sudah ditarik ke Kementerian PUPR. Sehingga, akibatnya banyak sekali perguruan tinggi, sekolah-sekolah swasta negeri yang datang kepada kami minta bantuan dukungan Sarpras sebagaimana disampaikan Ibu Anita tadi, kita tidak bisa memberikan *support* karena sudah ditarik ke Kementerian PUPR.

Kami juga minta masukan dari Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Apa iya semua harus Kementerian PUPR? Mulai dari pembangunan IKN, jembatan jalan tol, sampai sekolah sampai, kelas. *Nah*, ini yang masih belum kita habis pikir.

Silakan, Bapak-Ibu memberikan masukan-masukan, termasuk menjawab apa yang tadi sudah disampaikan. Dimulai dari apa? PGI dulu, mungkin nanti berlanjut kepada yang lain.

Silakan.

PERSATUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI) (Prof. YAFET Y.W. RISSY, S.H., L.L.M., M.Si., Ph.D.):

Baik.

**Pimpinan yang kami hormati,
Demikian juga Anggota Komisi X yang kami hormati,**

Terima kasih untuk kesempatan ini.

Terkait dengan pertanyaan Bapak Ketua Panja mengenai apakah menerima bantuan operasional tadi? Istilahnya adalah BOPTS, dapat saya pastikan bahwa dalam kasus, saya tidak tahu perguruan tinggi swasta Kristen yang lain, tapi dalam konteks Universitas Kristen Satyawacana, kami tidak mendapatkan, tidak mendapatkan. Yang kita dapatkan itu adalah bantuan berupa penempatan dosen PTN di PTS, beasiswa KIP, belakangan masuk juga BIP dari Kementerian Agama atau dari mana itu? PIP atau BIP, iya P ya. Lalu kemudian bantuan yang sifatnya kompetisi, yang tadi saya sudah jelaskan,

penelitian, pengabdian berbasis *research eh* kompetisi, dan juga IISMA (Pertukaran Mahasiswa Internasional), tapi BOPTS tidak menerimanya.

Yang kedua, saya ingin menanggapi. Terima kasih Prof, tadi ini sesama bis kota tidak boleh saling mendahului. Bapak lebih senior, saya harus izin sebagai guru besar, saya izin dulu. Kami yang mengelola perguruan tinggi swasta ini memang, *sorry to say*, PTN ini memang terlalu *bossy*. Maaf kalau saya menggunakan istilah itu, karena semua sudah disediakan pun masih aja mengeluh dan kurang. Saya tidak tahu lagi, apakah ada lagi fasilitas yang lebih mewah yang harus disiapkan? Tapi memang, saya setuju dengan Prof tadi, kalau perguruan tinggi swasta yang sudah unggul, terakreditasi unggul dan juga sudah punya *ranking* internasional, ini memang perlu mendapatkan topanan yang lebih.

Nah, saya sepakat, itu tidak berarti bahwa yang belum terakreditasi atau yang belum mendapatkan *international recognition* itu lalu ditinggal, tidak juga. Tetap di-*support*, mengapa begitu? Karena kita sebetulnya karena tanggung jawab konstitusional kita, lalu kita sebetulnya menjalankan fungsi negara, yang tadi saya katakan tadi pembukaan tadi. Saya senang tadi Ibu Anita menyinggung soal pasal *eh* apa namanya? Sila kelima.

Saya kira memang tanggung jawab konstitusional. Tapi, lebih dari pada itu, tanggung jawab moral dan etik kita sebagai sesama anak bangsa. Jadi, kemudian terkait dengan *item-item* pendidikan di swasta, secara umum sebetulnya sama saja. Cuma, besarnya, *magnitude*-nya itu yang berbeda tergantung kepada kualitas sekolah masing-masing.

Yang ada tentu SKS, ada biaya pembangunan, ada yang menggunakan istilah lebih keren sekarang "pengganti investasi", ada yang menggunakan istilah, ada juga asuransi dan seterusnya sudah kita tulis di situ. Tapi begini, variasinya cukup tinggi antara satu perguruan tinggi swasta ke perguruan tinggi swasta yang lain akibat daripada perbedaan *size and magnitude* daripada program tinggi swasta masing-masing. *Nah*, memang kalau kita ingin seragamkan saya kira solid. Tetapi memang, *item-item* inti, itu sudah ada dan sudah kita tulis di-*paper* itu.

Yang terakhir, terkait dengan PTN BH dan BLO.

Bapak-Ibu sekalian,

Saya diberikan sedikit kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk berkeliling di hampir seluruh negara dan saya sudah lihat, membandingkan, bahwa kalau persoalan di hulu ini tidak diselesaikan, jangan berharap Pak, nanti akan ada Panja lagi, akan ada lagi, begini terus. Memang kita tahu masalah-masalah pendidikan kita sangat kompleks dan tidak akan selesai dengan satu dua pertemuan, ini sebuah proses jangka panjang. Tapi, kalau persoalan di hulu ini kita tidak selesaikan, ini akan terus terjadi.

Yang saya maksudkan adalah neo liberalisasi sektor pendidikan tinggi yang sangat masif tadi. Ini hulu. Ini persoalan mendasar kita, fundamental *problem* kita. Ini dulu kita selesaikan. Apakah saya sepakat dengan Bapak Ketua Panja tadi? Kalau memang PTN BAN hukum atau yang layanan umum itu dimaksudkan supaya dia lebih mandiri dan efisien, dalam konteks apa? Dalam konteks *research*? Pengabdian pada masyarakat? Dalam konteks keuangan? Pengelolaan administratif atau dalam konteks apa?

Yang terjadi sekarang adalah tidak jelas kemandirian macam apa yang ingin diberikan? Otonomi kampus seperti apa yang akan diberikan? Akibat ketidakjelasan ini, lalu diterjemahkan kemandirian itu semata mata atau anshih kepada kemandirian keuangan. *Nah*, kalau begini apa bedanya dengan perguruan tinggi swasta? Kita sangat berpikir tentang efisiensi, kita sangat berpikir mengenai *input* dan *output cost* kita, supaya kita bisa *survive* sebagai PTS dan itu tidak dialami oleh PTN.

Tetapi, kalau kita memberikan, dalam tanda petik, kemandirian dalam konteks keuangan dan harus dibebankan kepada orang tua mahasiswa dan kepada siswa, saya kira negara mengkhianati konstitusi, mengkhianati juga warga negaranya sendiri. Saya kira ini persoalan mendasar kita yang perlu dipikirkan secara serius, yang terhormat Bapak-Ibu di Komisi X, agar bicara lagi dengan bapak menteri yang terhormat.

Apakah ini yang kita tuju? Kalau orientasi kita ini *quantity*, kita lihat sekarang pemeringkatan *global* kita di World Class University, saya kira senior saya Pak Prof tahu, hanya masuk pun 500 400-an. Kita kalah dengan Malaysia, di Malaysia kita *eh* di Asean saja kita nomor 9 kalau, *eh* nomor 5 kalau saya tidak salah, kalah dengan Malaysia.

Jangan *compare* dengan Singapore, dengan Malaysia saja kita *udah* kalah dalam konteks pemeringkatan global. Kenapa? Karena kita terlalu *jo-joran* dengan fokus pada Kementerian Keuangan kita. Kita lupa ada investasi non profit yang harusnya negara ada di sana. Ada pikiran dari *The Third Gidens*-nya Anthony Anthony Gidens *dan the third way*-nya, negara harusnya mengambil peran dalam investasi sosial yang non profit, jangan dibiarkan. Negara harus ada di sana. Karena itu, pikiran-pikiran Anthony Gidens dipakai oleh Margaret Thatcher, dipakai oleh Perdana Menteri John Major pada waktu itu dan Inggris jadi seperti ini, Amerika zaman Ronald Reagan jadi seperti ini, kita malah terbalik. Ya kita ini, Pancasila kita, *sorry to say*, tinggal tinggal nama. Walaupun saya percaya kita harus pegang teguh pada asas ini karena ini fundamental.

Tapi kalau begini pengelolaannya, *sorry*, Pancasila kita nanti kita hanya bicara liberalisasi, neo liberalisasi dengan pasar-pasar menekankan kepada siapa yang kuat siapa yang menang lalu negara angkat tangan, karena ini tidak menguntungkan, negara tidak perlu masuk.

Kalau ini Pak, saya jamin 30, 40, 50 tahun mendatang kita akan semakin terperosok. Tapi, kalau persoalan fundamental ini bisa kita talangi, kembalikan Pak generasi Bapak Prof, generasi yang terhormat Pak Ketua, kita semua tahun 90-an Pak. Kita lihat, 80-an Pak, orang beramai-ramai, yang kalangan menengah ke bawah itu beramai-ramai untuk sekolah di negeri. Sekarang terbalik Pak, dengan mandiri, yang kaya-kaya ini semua ramai-ramai bersekolah ke negeri. Lalu bagaimana kelas menengah ke bawah? Ke swasta setelah tidak diterima oleh perguruan tinggi negeri.

Bapak-Ibu yang terhormat,

Ini sangat fundamental, diselesaikan dulu ini. Kalau ini selesai, yang lain-lain itu menurut saya mudah diurai.

Terakhir, pendekatan-pendekatan terhadap *unit* pendidikan swasta yang dikelola oleh yayasan-yayasan di bawah keagamaan, itu harus dibedakan dengan yayasan-yayasan yang di-*back up* oleh *holding company*. Saya ulang sekali lagi, kali ini nampaknya tidak tersentuh. Sekolah-sekolah yayasan di bawah gereja, di bawah masjid, atau di bawah WALUBI, PGI, KWI, WALUBI, dan semacam-macam itu yang di bawah yayasan badan hukum, saya kira memang ini perlu mendapat perhatian khusus.

Tapi sekolah-sekolah yang di bawah atau yayasan yang di-*back up* oleh *holding company*, Pak ini, jangan sampai terjadi, ini hanya *money laundry*, Pak. Karena keuntungan saya di usaha-usaha saya, saya tidak bisa lagi reinvestasi, *ah* udah saya kasih ke yayasan saja. Yayasan *kan* punya saya, secara pribadi. Ketua ketuanya pembinanya orang saya keluarga saya, pengurusnya saya, pengawasnya orang saya.

Jadi, uang dari sektor profit, daripada saya bayar pajak mending saya kasih masuk ke yayasan yang punya saya juga, nanti gajinya saya naikin semuanya, kembali kepada saya juga. Ini tolong diperhatikan, Pak. Ada mekanisme "*money laundry*".

KETUA RAPAT:

Tambahin sedikit, Pak. Saya tertarik *nih* masalah *money laundry* ini. Berapa *sih* pajak pendidikan?

PERSATUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI) (Prof. YAFET Y.W. RISSY, S.H., L.L.M., M.Si., Ph.D.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Kan kalo pajak perusahaan *kan* bisa mencapai 40% dan sebagainya, kalau pajak pendidikan berapa persen?

PERSATUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI) (Prof. YAFET Y.W. RISSY, S.H., L.L.M., M.Si., Ph.D.):

Kalau pajak Pak, kalau kita tidak dikenakan pajak penghasilan atau profit. Jadi, kalau ada keuntungan itu harus dipakai habis dalam masa 4 tahun, namanya dana SiLPA. Kalau tidak dipakai habis dalam waktu 4 tahun untuk berinvestasi, maka akan dikenakan pajak. Sehingga kita akan terus menerus melakukan investasi dengan dana sisa yang dihitung sebagai profit.

Jadi, tidak kena pajak kecuali kita tidak menggunakan. Tetapi, pajak justru dikerahkan pada aspek-aspek lain seperti PBB, pengurusan AMDAL, PPN dan lain-lain sebagainya. Kalau kita beli tanah, kita, yayasan ingin melakukan ekspansi usaha, lalu kena. Tapi, untuk pendapatan tidak dikenakan, kecuali kita tidak menggunakan selama 4 tahun berturut-turut.

Terima kasih.

Yang terhormat Pak ketua Panja,

Saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Seru, ya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan besar masuk dunia pendidikan mungkin, ya? Oke *nggak papa*, itu catatan ringan kita.

Silakan dari yang lain.

PERSATUAN GEREJA-GEREJA INDONESIA (PGI) (JOHAN TUMANDUK, S.H., M.M., M.Min., MPd.K.):

Pak izin, Pak. Bu, izin.

KETUA RAPAT:

Boleh dari PGI, ya?

PERSATUAN GEREJA-GEREJA INDONESIA (PGI) (JOHAN TUMANDUK, S.H., M.M., M.Min., MPd.K.):

Saya menambahkan saja, bahwa saya *respect* dengan apa yang disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian. Bahwa nampaknya Bapak-Ibu sekalian sudah memotret.

KETUA RAPAT:

Izin Pak dekati *mic*-nya, Pak.

PERSATUAN GEREJA-GEREJA INDONESIA (PGI) (JOHAN TUMANDUK, S.H., M.M., M.Min., MPd.K.):

Oh iya.

Saya *respect* dengan apa yang disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian. Nampaknya, Bapak-Ibu Komisi X ini sudah memotret kondisi makronya secara baik. Namun, dari apa yang saya dengar tadi, dari Pak Pak Nur terutama dikatakan bahwa Bapak memerlukan data.

Nah, mungkin kita bisa bekerja sama Pak dalam hal ini. Artinya bukan hanya seperti narasumber satu kali bertemu lalu kemudian habis, *nggak* ada hubungan lagi. Karena, kami ada di lapangan yang bersentuhan langsung, secara khusus kami di Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, ini berhubungan langsung dengan 5700 NPSN.

Jadi, kalau bapak memerlukan data, dengan senang hati nanti kami akan memberikan data perbandingan, begitu ya Pak ya. Sehingga, Bapak bisa mendapatkan keadaan nyata di lapangan, *kan* seperti itu, menyangkut *standard cost* dan yang lain-lain yang Bapak sudah potret secara sangat baik, gitu. Itu catatan pertama, bagaimana kita bisa mengadakan satu apa? Komunikasi yang lebih intens ya Pak ya, di lapangan. Apalagi kami dari lingkungan gereja tentu akan lebih mudah dengan adanya jemaat-jemaat kami di lapangan. Jadi, ketika kita akan melakukan *cross check*, semua akan bisa berjalan lebih lancar seperti itu, ya. Itu catatan pertama.

Yang kedua, Ibu Anita Gah, apa yang Ibu sampaikan itu betul-betul suara hati kami. Bahwa perlu ada kesetaraan, perlu ada keadilan yang betul-betul dinyatakan bukan hanya pemanis bibir dan surga kuping, ya begitu. Saya pikir mungkin, bagaimana kita benar-benar bisa mewujudkan, ini yang penting Bu. Ya, karena ini sudah terjadi sekian lama dan secara jujur saya mau katakan bahwa realita di lapangan, bahwa kondisi kita semakin *decline*.

Tadi kan sudah di awal saya sudah katakan, tinggal bagaimana kita menyatukan langkah untuk itu. Jadi, buat saya *sih*, saya berterima kasih untuk Komisi X, Pak Pimpinan, bahwa apa yang Bapak potret ini adalah merupakan realita lapangan. Tinggal bagaimana Panja ini betul-betul bisa bekerja dan memanfaatkan kehadiran kami ini sebagai apa? Penyedia data di lapangan.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak.

Dari silakan dari PDH PHDI.

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI) (Dr. Ir. I WAYAN JONDRA, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan sidang atas waktu untuk yang kedua kalinya.

Yang pertama, kami ingin menanggapi berkaitan dengan PTN BH. Mohon izin Pimpinan sidang, kebetulan saya sendiri seorang dosen di Politeknik Negeri Bali, ya. Saya kira kalau pimpinan perguruan tinggi itu dituntut mencari dana di luar sumber dari UKT, mendapat dari sumber pendanaan lain ini, saya kira ini mimpi buruk, gitu. Mimpi buruk, berat sekali.

Dan ini pengalaman saya sebagai dosen Politeknik Pak ya, yang vokasi yang menghasilkan sebuah produk. *Nah*, tentu yang sumber lainnya mungkin yang bisa kita ya penyewaan sarpras, kemudian barang atau jasa ya. Itu pun nilainya kecil sekali, 5% itu sudah luar biasa itu dari pendapatan apa? PNBPNya. Ini, sehingga memang berat kalau memang di luar UKT.

Sehingga akhirnya, termasuk kami pun, saya di Politeknik Negeri Bali *kan* sudah BLU, akhirnya untuk bisa menunjang tuntutan pendapatan itu akhirnya memperbesar *student body*. Ini fakta yang terjadi, gitu. Sehingga, harapan saya nanti memang perlu ditinjau ulang untuk, pikiran untuk mendapatkan sumber pendanaan selain UKT. Karena kebetulan kami juga, saya kembali sekarang sebagai PHDI Pak ya, tadi itu intermezo saja sebagai seorang dosen di negeri, gitu.

Kalau di swasta, kami memang sumber pendanaan itu dari UKT saja, walaupun ada, kami menyewakan gedung-aula itu kecil sekali nilainya, kecil sekali nilainya. Dan kenapa kami bisa jalan, gitu kan? Karena betul-betul kami melakukan efisiensi, baik itu honor, pembiayaan-pembiayaan operasional, kami tekan habis, gitu. *Nah*, sehingga kita berhemat-hemat. Mungkin konsekuensinya kesejahteraannya berbeda. Pimpinan bisa lihat gaya hidup dosen swasta *full* dengan dosen negeri, gitu. Liat *aja* mobilnya seberapa mobil terjajar di perguruan tinggi negeri, seberapa mobil terjajar di perguruan tinggi swasta. *Nah*, itu kelihatan kesejahteraannya.

Artinya apa? Dari jam kuliah juga saya bisa bandingkan. Saya sebagai dosen negeri dengan teman saya yang di dosen swasta, waktunya betul-betul habis di kampus, mereka. Karena, beban mengajarnya itu dia jauh lebih padat daripada saya jadi dosen negeri. *Nah*, di UNHI pun, bahwa ini kita juga melakukan itu supaya kita bisa operasional. Artinya apa? Honor kita tekan, jam dia harus, kalau dosen negeri apa? Kewajibannya 12 SKS per semester, kalau kita lebih dari itu. *Nah*, ini yang yang apa? Yang pengalaman kami.

Terkait dengan apa yang diharapkan, tadi berkaitan dengan berapa *sih* sebenarnya biaya-biaya ini? Ya, tentu ini kita butuh waktu sebenarnya. Mungkin kalau diberikan waktu ya kita akan mengkalkulasi betul, *mem-breakdown* berkaitan dengan standar biaya, berapa sebenarnya yang kita habiskan. Paling tidak kita berpikir bahwa ada tiga komponen utama yaitu kebutuhan sekolah, kebutuhan peserta didik, kemudian kebutuhan sarpras. Di

situ harus kita bagi menjadi *fix cost* dan *variable cost*, kan gitu. Ini yang harus kita menjadi komponennya. Ini terus terus terang kami butuh waktu untuk merumuskan ini. Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, menanggapi BOPTS, kebetulan kami tidak mendapatkan itu. Karena kami, satu, punya perguruan tinggi swastanya itu Universitas Hindu Indonesia, kami tidak dapat BOPTS dan tapi ada biaya-biaya yang lainnya sifatnya bantuan ya. Itu pun sifatnya tidak rutin dan walaupun ada harapan dari pengelola kami, mungkin biaya pengalokasian ke daerah itu eh dana pendidikan di daerah, mungkin tidak dibatasi hanya untuk apa namanya? Sekolah dasar, sekolah menengah ya. Nah itu. Tapi bisa juga perguruan tinggi.

Nah, karena ada di beberapa daerah yang memang pendapatan daerahnya cukup tinggi, bisa diapa namanya? Diberikan ke perguruan tinggi setempat. Nah, ini ini keran ini perlu juga diciptakan, sehingga berpeluang bagi PTS untuk bisa mendekati pemerintah daerahnya untuk mendapatkan hibah di situ.

Kemudian yang keempat, berkaitan dengan daerah 3T yang disampaikan oleh Bu Ibu Anita ya, jadi mungkin tidak hanya apa namanya? Keberpihakan masalah biaya, tapi juga berkaitan dengan metode. Mestinya, pemerintah harus bayar dosanya terhadap ketimpangan pembangunan di daerah "T" ini.

Pengalaman kami di Bali mengelola anak-anak miskin di sekolah Bali Mandara, di mana di sana itu muridnya berasal dari keluarga miskin, 80% IQ-nya di bawah 90. Itu kita harus didik luar biasa dengan metode yang berbeda dari sekolah umum, untuk mampu menciptakan mereka generasi-generasi berprestasi, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Nah, ini contoh, akhirnya dan itu berhasil.

Tapi, zaman Pak Gubernur Koster, kemarin sempat dijadikan sekolah reguler, ternyata sekolah itu *ndak* ada peminatnya setelah diregulerkan. Zaman PJ Gubernur sekarang yang sekarang, itu kami dari masyarakat mendesak itu dikembalikan menjadi sekolah *boarding* dan syukur di, terima kasih di kepada pemerintah dan saya yakin ini juga dorongan dari Komisi X untuk mengembalikan, per tahun ini, Bali Mandara kembali menjadi sekolah *boarding*. Kami sangat berharap sekolah ini betul-betul menjadi laboratorium untuk memperbaiki masyarakat dari berlatar belakang miskin. Mungkin itu.

**Bapak-bapak,
Ibu dari Pimpinan sidang,
Bapak-Ibu anggota dewan yang terhormat,**

Yang yang bisa kami sampaikan tambahan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian.

Terima kasih.

f

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih, Pak.

PGI sudah, KWI sudah, WALUBI sudah.

KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA (KWI) (YOHANES VAJAR JUNIYANTO, S.Pd., M.M.):

Saya belum, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh KWI belum ya? Silakan.

KONFERENSI WALI GEREJA INDONESIA (KWI) (YOHANES VAJAR JUNIYANTO, S.Pd., M.M.):

Baik. Terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan, apakah di Perguruan Tinggi Katolik mendapatkan BOPTS? Tadi saya sudah konfirmasi ke teman-teman APTIK (Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik), mereka menyatakan mereka belum mendapat atau tidak dapat, seperti itu. Yang ada hanya, misalnya, bantuan hibah kompetisi perguruan tinggi, itu pun kalau juara, kalau tidak juara tidak dapat, seperti itu. Itu terkait dengan bantuan operasional di perguruan tinggi swasta.

Kemudian tadi, pertanyaan berikutnya terkait apakah sekolah-sekolah di Katolik itu masuk di Kementerian Agama atau Kemendikbud? Selama ini sekolah-sekolah kami di Katolik, baik itu yang di seminari, ada yang seminari menengah seperti itu, maupun seminari tinggi, kita semua masuk di Kemendikbud. Artinya, di ada yang di Dikti ada yang juga di kementerian, seperti itu.

Jadi, *at least* kita semua masuk di Kemendikbud, tidak ada di Kemenag. Dan kemarin Menteri Agama menyampaikan bahwa sekolah katolik itu akan dimasukkan atau akan dijadikan sekolah negeri, ya. Sebenarnya kami juga satu sisi kami berbahagia, namun satu sisi juga mungkin ada ciri khas-ciri khas sekolah keagamaan itu harus tetap ada. Seperti sekolah Muhammadiyah, sekolah di MTS, itu juga kan ada sekolah-sekolah yang berciri khas keagamaan walaupun dinegerikan.

Nah, itu harapannya juga tidak hilang, kalau seandainya itu ada sekolah Hindu, ada sekolah yang lain. Jadi kalau seandainya sekolah kami, sekolah Katolik atau perguruan tinggi Katolik mau di-*support* oleh pemerintah, puji Tuhan, harapannya itu bisa terealisasi. Tapi ya kembali tadi, ciri khas kami harapannya tetap ada.

Lalu yang ketiga, terkait dengan pengelolaan sumber pendanaan, tadi juga sampaikan teman-teman dari majelis yang lain, bahwa kita perlu hitung-hitungan secara lebih. Karena, kalau dari kami sendiri *at least* kami memang sudah hitung-hitung, ya Pak ya. Artinya, kegiatan setahun itu seperti apa, ada bantuan dari pemerintah, lalu bantuan dari, mungkin kalau ada penderma ya puji Tuhan, kemudian dari SPP itu berapa, itu sudah kita hitung dan memang ngepres gitu ya, dibuat ngepres.

Jadi tadi, kalau seandainya orang tua tidak membayar SPP dan itu yang akan menjadi kesulitan bagi kami. Jadi harapannya tadi, kalau misalnya ada PIP itu langsung masuk ke rekening sekolah untuk membantu kami, seperti itu. Kalau di sekolah Katolik kita tetap ada internal audit, ada eksternal audit, jadi terkait dengan apakah dana BOS itu dengan yayasan dengan sekolah itu sering tidak klop? Kami klop.

Jadi, yayasan sangat mendukung atau bahkan menyerahkan semuanya ke sekolah dan bahkan laporannya pun kami dobel, jadi ya ke sekolah dan juga ke yayasan maupun juga ke pemerintah dan sama seperti itu. Jadi, secara umum kita melaporkan semuanya itu secara lengkap. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau di wilayah-wilayah lain, pedalaman, *nah* itu mungkin menjadi perhatian pemerintah terkait dengan pembiayaan, tadi yang sampaikan oleh Bapak Ibu dari Panja, luar biasa perhatian untuk daerah-daerah pedalaman.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati,

Dulu kami pernah membuat Panja Pendidikan Tinggi. Di dalam Panja Pendidikan Tinggi itu, kita sudah memberi rekomendasi seperti, perguruan tinggi negeri tidak boleh membuka jalur mandiri sampai berbulan-bulan supaya fokus kepada penerimaan mahasiswa yang undangan, yang apa? Seleksi dan sebagainya. Jalur mandiri itu di kita kita kurangi, bahkan tidak boleh melebihi sekian persen, saya lupa, ya.

Jadi, tidak boleh mengejar kepada yang namanya *student body*. Tujuan utamanya supaya berbagi dengan kampus-kampus perguruan tinggi swasta. Kalau kita lihat tadi cerita tahun 90, 90 dan 2000-an, orang masuk perguruan tinggi negeri itu karena terjangkau dan murah. Orang masuk perguruan tinggi swasta karena dianggap ada kelebihan dari sisi lain-lainnya. Kalau sekarang kan kebalik, yang kaya masuk perguruan tinggi negeri, yang kurang mampu larinya ke swasta. Memang ini harus kita rubah, konsep ini harus kita rubah. Apakah karena PTN BH tadi? Ya, atau karena memang, tadi sudah dikatakan; mengelola, mencari tambah di luar UKT itu berat.

*Nah, ini makanya Panja ini sebenarnya, mudah-mudahan nanti rekomendasi akhirnya adalah mengembalikan kembali tanggung jawab negara itu justru kepada yang membutuhkan, swasta silakan mencari pada mahasiswa-mahasiswa yang katakanlah berlebihan. Tapi *nggak papa*, ini kan semua masih proses, ya? 3 bulan kita masih menggali dari berbagai stakeholder.*

Saya coba bacakan kesimpulan hari ini.

Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber yang telah dalam menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai biaya pendidikan dengan beberapa poin utama, antara lain:

1. Persatuan, maaf, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia menyampaikan catatan dan rekomendasi antara lain sebagai berikut:
 - a. Neoliberalisasi ekonomi di bidang pendidikan telah berlangsung secara masif. Terdapat privatisasi pengelolaan PTN BH dan PTN BLU dan berorientasi profit dan mengabaikan kualitas produk belajar mengajar, sehingga kebijakan pengelolaan tersebut perlu dievaluasi.
 - b. Pemerintah perlu transparan dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang dialokasikan 20% dari APBN APBD dan mengajukan skema pembiayaan pendidikan berbasis kinerja terhadap semua lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta.
Ini masukan bagus juga, ya.
 - c. Pemerintah perlu lebih menunjukkan keberpihakan terhadap lembaga-lembaga pendidikan swasta, terutama terkait dengan pengelolaan lulusan PPG dan Guru Pra-Jabatan.

Tentang guru-guru honorer yang jadi ASN.

2. Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI menyampaikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan berbagai program bantuan pendidikan dari pemerintah perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan, serta memperbaiki transparansi dan menyederhanakan prosedur pelaksanaan.
 - b. Pemerintah perlu mengatasi kendala pendidikan di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar, terutama kendala sarana prasarana pendidikan, ketersediaan, guru dan dukungan teknologi informasi.
 - c. Pemerintah perlu lebih memperhatikan pengelolaan pendidikan swasta, terutama mengevaluasi kebijakan guru swasta yang lulus P3K untuk tidak dipindahkan ke sekolah negeri.

3. Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) menyampaikan catatan dan rekomendasi. Antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan dan penggunaan anggaran pendidikan pemerintah dilakukan, anggaran pendidikan dari pemerintah dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
 - b. Mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dan dana pendidikan khusus kepada lembaga pendidikan agama Buddha.
4. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menyampaikan catatan dan rekomendasi. Antara lain sebagai berikut:
 - a. Perguruan tinggi swasta merupakan kluster binaan yang perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan pembiayaan Pendidikan.

Mungkin perguruan tinggi swasta agama kali ya, maksudnya ini ya?

Baik, oke.

Lalu kemudian.

- b. Kemendikbudristek perlu menyusun standar pembiayaan operasional seluruh jenjang pendidikan, sehingga mempermudah perencanaan dan pengalokasian bantuan dana di setiap lembaga pendidikan negeri maupun swasta.
- c. Mendorong adanya regulasi yang mengakomodir adanya pemenuhan biaya pendidikan melalui program-program pemerintah dan pemerintah daerah pada pelaksanaan pendidikan di Pasraman.

Terhadap pandangan penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X menyampaikan pandangan. Antara lain:

1. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan PTN BH maupun PTN BLU yang terdapat kecenderungan pengelolaan secara privatisasi dan berorientasi profit.
2. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk melaksanakan program bantuan pendidikan sesuai dengan standar pembiayaan operasional (komponen biaya) dan kebutuhan di masing-masing daerah.
3. Mendorong PGI, KWI, WALUBI dan PHDI untuk menyampaikan dukungan data terkait kompon, standar komponen biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan keagamaan sesuai dengan kebutuhan, untuk pelaksanaan proses pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan keagamaan swasta.

Baik.

Saya, saya rasa Pak Prof, kesimpulan nomor 1 menurut saya itu mustinya jadi kesimpulan akhir. Jadi, jangan dimunculin dulu sekarang. Kita masih mendengar banyak masukan ini. Iya ini pan Panja ini kan *long term*, Pak. Saya sarankan, *nggak* usah itu nomor 1, karena kita belum mengambil keputusan ya. Tapi, kalau untuk yang 2 ini, saya pikir oke. Nomor 3 perlu menjadi perhatian karena ini masukan dari kawan-kawan.

Silakan, Pak Prof. Gimana, Pak Prof?

Kalau bayangan saya, nanti yang nomor 1 itu adalah *ending*-nya kita akan, yang tadi PTN BH-BLU.

Pak Prof, cukup ini saja rekomendasi kita. Kalau yang tadi kan yang di atas itu kan masukan-masukan dari kawan-kawan.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.)

Saya kira perlu ditambahkan. Dukungan dari PGI, KWI, WALUBI dan PHDI, data masukan untuk meninjau kembali postur distribusi anggaran 20% itu.

KETUA RAPAT:

Boleh boleh.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.)

Ini saya kira perlu dukungan dimasukkan satu poin lagi.

KETUA RAPAT:

Transparansi, ya?

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.)

Ya.

KETUA RAPAT:

Jadi gimana?

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.)

Meninjau dukungan dari KWI, WALUBI, PGI dan PHDI.

KETUA RAPAT:

Nggak, di poin tiga, poin tiga, poin tiga aja.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.)

Masukan untuk menyusun kembali postur distribusi sumber anggaran yang dari APBN yang *mandatori* 20% ini secara lebih proporsional, agar bisa menghasilkan tujuan pendidikan nasional kita. Karena.

KETUA RAPAT:

Jadi maksudnya gini, “mendorong PGI, KWI, WALUBI, dan PHDI untuk memberikan dukungan terhadap penyaluran”.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.)

Ya.

KETUA RAPAT:

Gitu, ya?

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.)

Iya, boleh.

KETUA RAPAT:

Alokasi anggaran 20%. Ini maksudnya kita minta, intinya kan sebenarnya kita pengen Pak dari 20% yang 665.000.000.000, itu kan kita cuma dapat 15%. Padahal kalau kita pengen bantu 4.400 perguruan tinggi dan lain-lain, ya *nggak* mungkin anggaran segitu. Bayangkan 38.000.000.000 dari anggarannya Dikti, 14.000.000.000-nya KIP kuliah, terus sekian lagi untuk bantuan-bantuan, ya *nggak* jalan Pak, belum buat apa namanya? Kegiatan-kegiatan.

Jadi menurut saya, perlu kita dorong agar alokasi 20% itu, paling tidak 30% sampai 50% alokasi APBN itu, itu dikelola Kemendikbud. Dari 98 itu paling tidak naik jadi 150.000.000.000.

Nah, itu mungkin kita bisa mendorong BOPTN, KIP kuliahnya ditambah, terus riset-riset dan lain-lain, sehingga tidak mengandalkan PTN BH. Maksudnya Pak Prof kan kurang lebih adalah distribusinya itu nanti lebih di apa?

Cukup begini *nggak*, Pak Prof?

Saya ngerti maksudnya Pak Prof tapi ngomongnya susah ini.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.)

Untuk Pendidikan.

f

KETUA RAPAT:

Dukungan terhadap peninjauan penyaluran distribusi.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.)

Untuk memberikan dukungan terhadap peninjauan penyaluran.

KETUA RAPAT:

Cukuplah, ya?

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.)

Iya.

KETUA RAPAT:

Baik.

Ibu Anita ada tambahan? Maksud di dalamnya distribusi, bukan hanya distribusi tapi penggunaan. Penyaluran distribusi dan penggunaan alokasi anggaran 20%. Karena, yang tadi saya katakan, sarpras-sarpras itu *kan* adanya di PUPR, bukan di bukan di sini lagi.

Cukup? Kawan-kawan? Cukup ya? Baik.

Silakan dari kawan-kawan KWI, PGI, WALUBI dan PHDI. Apakah cukup kesimpulan kita? Karena ini masih panjang Pak, kita masih beberapa kali pertemuan.

Cukup ya Pak, ya?

Baik. Terima kasih.

(RAPAT : SETUJU)

KETUA RAPAT:

Jadi untuk hari ini, ini permulaan yang bagus sekali. Kita sudah mendapat *insight* dari Bapak-bapak Ibu-Ibu sekalian, bahwa ternyata ada konotasi PTN BH ini akhirnya menjadi kapitalisasi pendidikan. Karena akhirnya, dibebankan lebih banyak kepada UKT, bukan kepada konsep-konsep pembiayaan yang lainnya.

Dan juga tadi, kurang lebih, perlunya ada perhatian khusus bagi dari Kemendikbud terhadap perguruan tinggi swasta atau pelaksana pendidikan-pendidikan swasta, sebagaimana yang disampaikan menterinya bahwa beliau

adalah menteri pendidikan semuanya, swasta dan perguruan tinggi dan negeri. Tapi, kayaknya dari pihak swasta merasa belum kali Pak, ya?

Belum. *Nggak papa*, Pak. Ini nanti untuk apa namanya? Rekomendasi kalau nanti mau nyari menteri pendidikan baru supaya lebih berpihak. Ya, kan tinggal 4 bulan, Pak. Jadi, sangat logis sekali.

Terima kasih, Bapak-bapak Ibu-Ibu sekalian.

Mungkin silakan ada kata penutup mewakili Bapak-Bapak, dari? Silakan.

Ada kata penutup, *monggo* dari yang senior atau dari yang belum pernah ngomong, yang Bapak di belakang belum pernah ngomong, Pak.

Dari Ibu silakan.

PERSATUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI) (PENDETA LENTA E SIMBOLON):

Baik. Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Dewan yang kami muliakan,

Kami dari PGI, siap untuk bekerja sama ke depan, termasuk tadi rekomendasi yang terakhir. Karena memang, karena undangan juga kemarin agak terburu-buru, jadi untuk kebutuhan data memang perlu proses lebih lanjut.

Jadi, nanti kebutuhan-kebutuhan data berikutnya, silakan saja berkomunikasi dengan kami, apa-apa saja yang perlu kami persiapkan dengan *stakeholder* yang ada di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Yang pasti kita siap bekerja sama, Bapak dan Ibu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih.

Mohon maaf kalau undangannya terburu-buru, karena ada mekanisme. Sebetulnya kita *ngundang* sudah seminggu yang lalu, tapi ini proses perjalanan ini dari sini, ke Sekjen DPR dulu, ke Pimpinan DPR, baru kemudian keluar. Jadi, memang ada ada satu proses.

Kami mohon maaf, ya Bu ya. Nanti kita akan perbaiki, kita *ngundang* 2 minggu sebelumnya supaya masuk tepat waktu.

Akhir kata, teman-teman terima kasih banyak atas kehadiran dan kita tutup dengan membaca *Hamdalah*.

Alhamdulillahirabbil 'alamin

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.04 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

Ttd.

**DADANG PRAYITNA, S.IP., M.H.
NIP. 196708061990031003**